

**TEKNIK KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MEMBANGUN
MASYARAKAT MADANI DI KOTA LANGSA**

T E S I S

Oleh:

**S A N U S I
NIM 06 KOMI 1047**

**Program Studi
KOMUNIKASI ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

DAFTAR ISI

	hal
PERSETUJUAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Istilah	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	9
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Konsep-Konsep Yang Berkaitan Dengan Komunikasi	11
1. Pengertian Teknik Komunikasi	11
2. Bentuk-Bentuk Komunikasi	16
B. Pentingnya Komunikasi Dalam Pembangunan	20
C. Konsep Masyarakat Madani	31
1. Sejarah dan Pengertian Masyarakat Madani	31
2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani dan Beberapa Prinsip Yang Diterapkan di Dalamnya	34
3. Hubungan Masyarakat Madani dengan Aspek lainnya	36
D. Kajian Terdahulu	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis Penelitian	41
B. Informasi Penelitian	42
C. Sumber Data	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	43
F. Teknik Keabsahan Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Sekilas Tentang Kehidupan Masyarakat Kota Langsa	46
1. Kondisi Geografis Kota Langsa	46
2. Kondisi Sosial Kemasyarakatan	48
3. Kondisi Keagamaan	52
4. Kondisi Pendidikan	53
B. Teknik Komunikasi Pemerintah Dalam Membangun Masyarakat Madani Di Kota Langsa	61
C. Media Yang Digunakan Pemerintah Dalam Menyampaikan Pesan-Pesan Pembangunan	71
D. Hasil Komunikasi Yang Dilakukan Pemerintah	82
 BAB V PENUTUP	 100
A. Kesimpulan	100
B. Saran-Saran	101
 DAFTAR KEPUSTAKAAN	 102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu cita-cita gerakan reformasi yang dilakukan mahasiswa pada tahun 1998 yang lalu dan tetap dianggap relevan saat ini adalah terbentuknya masyarakat madani, atau yang sering juga disebut dengan *civil society*. Hal itu ditandai dengan adanya upaya-upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bagus dan bersih (*clean and good governance*) yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan penegakan supremasi hukum.

Secara historis, wujud nyata masyarakat madani mulai dikenal sejak hijrahnya Rasulullah saw. dari Makkah ke Madinah. Perubahan nama Yatsrib menjadi Madinah pada hakekatnya merupakan sebuah pernyataan niat untuk membangun masyarakat yang beradab sebagai tandingan bagi masyarakat jahiliyah. Sebagaimana dikutip Sufiyanto dari Munawir Sjadzali yang menegaskan bahwa pembangunan masyarakat madani diawali dari deklarasi Piagam Madinah yang dibuat oleh Rasulullah saw. Piagam Madinah berisi 50 keputusan bersama yang mengatur hubungan antara komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat pluralis di Madinah. Dengan kata lain, Piagam Madinah dalam terminologi politik adalah wujud konkrit dari terbentuknya masyarakat madani.¹

¹Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 97.

Masyarakat madani yang dibangun Nabi Muhammad saw. adalah cermin dari sebuah kota demokratis yang menghargai pluralitas.

Prinsip-prinsip dasar yang ditegakkan di dalamnya adalah keadilan, supremasi hukum, egalitarianisasi dan toleransi. Dengan demikian, masyarakat madani merupakan sebuah masyarakat yang demokratis, pluralistis, transparan, partisipatif dan dinamis.

Di Indonesia, wacana masyarakat madani mulai berkembang pada awal tahun 1990-an dan semakin mencuat setelah terjadinya gerakan reformasi yang dipelopori mahasiswa pada tahun 1998.² Perkembangan tersebut semakin mencuat bersamaan dengan bangkitnya organisasi-organisasi sosial dan LSM-LSM yang aktif membina jaringan-jaringan komunitas pembangunan yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam seluruh sektor kehidupan.

Salah satu determinan yang paling kritis dari keberhasilan mencapai tujuan pembangunan masyarakat madani adalah terletak pada jenis pendekatan yang digunakan oleh pemerintah. Asumsinya, bahwa untuk membangun masyarakat madani dalam ikatan persamaan dan persaudaraan sejati, diperlukan kerangka dan pendekatan yang lebih bersifat evolusioner dari pada revolusioner.

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dipahami bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani dibutuhkan waktu yang lama. Namun demikian, niat baik pemerintah untuk membangun masyarakat madani perlu didukung semua pihak, karena mustahil untuk mewujudkan cita-cita tersebut, jika tidak didukung semua pihak. Terutama jika dilihat dari pluralnya masyarakat Indonesia.

²Chairil Anwar, *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 76-79.

Dalam kaitan itulah dibutuhkan komunikasi yang berkesinambungan antara institusi sosial yang berada pada sektor publik (pemerintah dan partai politik), sektor swasta (pelaku bisnis) dan sektor sukarela (lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan dan kelompok profesional). Karena bagaimanapun, komunikasi yang berlangsung di kalangan manusia bertujuan untuk membentuk saling pengertian (*mutual understanding*) sehingga terjadi kesetaraan kerangka referensi (*frame of references*) dan kesamaan pengalaman (*field of experience*) diantara orang-orang yang melakukan komunikasi.³ Dari pengalaman-pengalaman komunikasi tersebut, diharapkan terbentuk iklim komunikasi yang berkesinambungan.

Komunikasi yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia, merupakan konsekuensi dari hubungan sosial (*social relation*) antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Hubungan antara manusia bisa saja berlangsung antara satu orang atau lebih, bahkan dalam jumlah yang lebih besar dan lebih banyak yakni dalam sebuah negara. Hubungan tersebut menimbulkan interaksi sosial yang berkesinambungan antara satu orang dengan orang lain, ataupun antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Dalam Konsep hubungan antarkelompok mencakup semua kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan kriteria ciri fisiologis, kebudayaan, ekonomi dan perilaku⁴

Dalam kaitan itu, Kota Langsa sebagai kota yang bercita-cita mewujudkan masyarakat madani mempunyai visi : “Terwujudnya Masyarakat yang Aman, Damai,

³Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, cet. 18 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h.13.

⁴Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2000), h. 129.

Bermatabat, Maju, Sejahtera, dan Islami”.⁵ Sedangkan yang menjadi misi Kota Langsa adalah sebagai berikut :

1. Menjalankan syariat Islam sesuai kebutuhan syariah dan sesuai dengan status yang disandang oleh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang murah, maju, dan berkualitas yang bernuansa islami;
3. Meningkatkan kegiatan dakwah islamiah, membentuk dan membina remaja mesjid, dan mengaktifkan shalat berjama'ah lima waktu bagi seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan kapasitas bagi para pelaku ekonomi daerah khususnya yang berbasiskan ekonomi rakyat;
5. Mengembangkan industri pengolahan yang mendukung sektor pertanian, berikut seluruh sub sektornya;
6. Mengembangkan dan memanfaatkan lahan-lahan potensial sektor pertanian untuk memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha, dan membentuk kelompok-kelompok usaha pertanian dan industri guna mempermudah pembinaan dan pengembangan;
7. Membangun dan mengembangkan kapasitas pelabuhan Kuala Langsa, mengidentifikasi peluang-peluang investasi di sektor industri dan perkebunan, serta mendorong pengembangan teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan industri;
8. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk seluruh masyarakat, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan yang berkualitas, dan meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan;

⁵Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa, *Langsa Dalam Angka 2010*,

9. Meningkatkan kesejahteraan sosial bagi para pihak sebagaimana yang dijanjikan oleh Undang-Undang 1945;
10. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur di semua sektor pembangunan;
11. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah agar pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan secara cepat, tepat, serius dan maksimal; dan
12. Melaksanakan pembangunan berdasarkan usulan dari bawah sehingga pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat luas.⁶

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Langsa yang pada akhirnya terbentuklah masyarakat madani sebagaimana yang menjadi harapan dari semua pihak, khususnya masyarakat Kota Langsa, maka komunikasi memainkan peranan yang cukup penting dan serius sehingga dituntut pemerintah untuk lebih meningkatkan frekwensi komunikasi dengan masyarakat, dengan menggunakan teknik-teknik komunikasi sebagaimana yang diharapkan masyarakat Kota Langsa. Komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan dan teknik, misalnya secara lisan, tulisan, verbal, nonverbal, satu tahap maupun banyak tahap. Hal itu dianggap sangat penting terutama dalam mempertahankan terciptanya suasana damai dan kondusif di Kota Langsa. Karena masyarakat madani adalah masyarakat yang jauh dari konflik horizontal, permusuhan dan pendiskriminasian.

Dari pengamatan yang dilakukan, secara umum pemerintah Kota Langsa telah melakukan berbagai hal yang menyangkut dengan penyampaian pesan-pesan kepada masyarakat. Dalam mewujudkan tatanan masyarakat madani yang dicita-citakan, pemerintah Kota Langsa mengajak masyarakat untuk mendukung program-

⁶*Ibid.*

program pembangunan yang telah direncanakan pemerintah. Program-program tersebut disampaikan dengan teknik komunikasi yang sangat bervariasi, seperti melakukan komunikasi satu arah, komunikasi dua arah, komunikasi persuasif dan melalui tulisan.

Teknik komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa secara realitas belum mampu menciptakan suatu tatanan masyarakat madani yang dicita-citakan. Di masyarakat masih terlihat kuatnya semangat etnisitas yang memunculkan perasaan superior dari pada etnis lainnya. Munculnya pemaksaan kehendak pemerintah kepada masyarakat juga merupakan fenomena yang terus mengemuka dan semakin kontras. Artinya, dalam mengambil keputusan dan menetapkan kebijakan pemerintah lebih mengutamakan kepentingan sebelah pihak. Keadilan sebagaimana yang diharapkan masyarakat juga belum bisa ditegakkan. Praktek diskriminasi terhadap sebahagian masyarakat, terutama masyarakat miskin dan marginal masih terus berlangsung. Bahkan sebahagian masyarakat belum menerima informasi dari pemerintah secara utuh, karena penyampaian pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat sifatnya lebih cenderung emosional dari pada rasional. Kondisi ini tentulah bertentangan dengan konsep ideal masyarakat madani yang dicita-citakan sebagaimana yang dipraktekkan Nabi.

Kondisi di atas mengharuskan adanya perubahan paradigma dalam mewujudkan kebijakan dengan mengutamakan pola-pola keberpihakan pada masyarakat. Pemerintah Kota Langsa harus memandang peran masyarakat sebagai hal yang dinamis dan dapat memberikan suatu peluang untuk membangun pemerintah yang bersih (*clean governance*). Karena pemerintahan yang bersih merupakan ciri dari perwujudan masyarakat madani yang dicita-citakan. Amin Rais berpandangan bahwa bangsa-bangsa secara umum, termasuk Indonesia dihadapkan

kepada lima persoalan besar, yaitu: (1) demokratisasi, (2) pembentukan pemerintah yang bersih, (3) penegakan keadilan sosial, (4) pembangunan SDM dan (5) penguatan persatuan dan kesatuan. Kelima masalah besar tersebut sangat ditentukan oleh sejauhmana pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dapat menanganinya secara arif dan bijaksana.⁷

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan di atas, peneliti berasumsi bahwa teknik komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa kepada masyarakat belum menampakkan suatu sistem yang baik. Dalam kaitan itulah peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tesis tentang: "*Teknik Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Masyarakat Madani di Kota Langsa.*"

B. Rumusan Masalah

Secara umum rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah teknik komunikasi pemerintah dalam membangun masyarakat madani di Kota Langsa?. Sedangkan secara khusus rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
Bagaimanakah teknik komunikasi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan masyarakat madani di Kota Langsa?.

C. Batasan Istilah

Judul tesis ini menggunakan beberapa istilah yang perlu dibatasi agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak terjadi kesalahpahaman antara pembaca dan penulis. Istilah-istilah yang perlu dibatasi sebagai berikut:

⁷Alo Liliwari, *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 245.

1. Teknik komunikasi terdiri dari dua kata, yaitu kata teknik dan kata komunikasi. Teknik diartikan dengan keterampilan dan diartikan juga sebagai metode.⁸ Sedangkan komunikasi dipahami sebagai proses pertukaran informasi antara seseorang dengan yang lainnya sehingga tercipta pengertian yang sama dalam memahami objek yang dibicarakan.⁹ Dengan demikian, teknik komunikasi yang dimaksud dalam tesis ini adalah mencakup cara maupun upaya yang mencakup strategi dan taktik yang dilakukan pemerintah dalam rangka menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, sehingga masyarakat madani yang dicita-citakan dapat terwujud.
2. Pemerintah yang dimaksud dalam tesis ini adalah pemerintah Kota Langsa, yaitu salah satu kota yang berada di propinsi Aceh.
3. Membangun. Kata ini diderivasi dari kata “bangun” yang dibubuhi awalan “mem” yang berarti membina ataupun mewujudkan.¹⁰
4. Masyarakat madani yang dimaksud dalam tesis ini adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, supremasi hukum, egalitarian, toleran dan demokratis dalam kemajemukan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui teknik komunikasi pemerintah dalam membangun masyarakat madani di Kota Langsa. Secara khusus tujuan

⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 916.

⁹Hafied Cangara, *Pengantar Ilmu Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998), h. 19.

¹⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus.*, h. 77.

penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tentang teknik komunikasi pemerintah dalam mewujudkan pembangunan masyarakat madani di Kota Langsa.

E. Kegunaan Penelitian

Apabila penelitian ini dapat terlaksana dengan baik dan berhasil, maka penelitian ini diharapkan akan berguna:

1. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kota Langsa dalam menyiasati teknik komunikasi yang relevan dengan kondisi masyarakat Langsa, sehingga masyarakat madani yang dicita-citakan dapat diwujudkan.
2. Bahan masukan bagi para politisi, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, pemuka agama, pemuka adat dan tokoh masyarakat, untuk bersinergi dengan baik dalam mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan.
3. Sebagai kontribusi bagi kajian keilmuan yang berkaitan dengan penelitian sosial kemasyarakatan sekaligus penambah bagi khazanah keilmuan bagi mahasiswa pascasarjana IAIN SU, terutama bagi mahasiswa yang konsentrasi dalam kajian Komunikasi Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Tesis ini disusun ke dalam V bab. Bab demi bab akan dibagi ke dalam beberapa sub bab yang masih memiliki kaitan sehingga lebih mudah dipahami. Konkritnya, sistematisasi pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Pada pendahuluan dibahas konsep ideal masyarakat madani dan upaya komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dalam mewujudkan masyarakat madani. Yang meliputi pembahasan tentang; (a) Latar

belakang masalah, (b) Rumusan masalah, (c) Batasan istilah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Kegunaan penelitian dan (f) Sistematika pembahasan.

Bab II Kajian pustaka membahas tentang landasan teoretis. Kajian pustaka meliputi pembahasan tentang; (a) Konsep-konsep yang berkaitan dengan komunikasi, (b) Pentingnya komunikasi dalam pembangunan, (c) Konsep masyarakat madani, dan (d) Kajian terdahulu.

Bab III Metodologi penelitian yang akan membahas tentang; (a) Jenis penelitian, (b) Informan penelitian, (c) Sumber data, (d) Teknik pengumpulan data, (e) Teknik analisis data dan (f) Teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian yang meliputi; (a) Sekilas tentang kehidupan masyarakat Kota Langsa, (b) Teknik komunikasi pemerintah dalam membangun masyarakat madani di Kota Langsa, (c) Media yang digunakan pemerintah dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan dan (d) Hasil komunikasi yang dilakukan pemerintah.

Bab V Kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep-Konsep yang Berkaitan dengan Komunikasi

1. Pengertian Teknik Komunikasi

Komunikasi adalah suatu aspek kehidupan manusia yang sangat mendasar, penting, dan kompleks. Kehidupan sehari-hari manusia sangat dipengaruhi oleh komunikasi. Dalam kerangka pembahasan mengenai teknik komunikasi terlebih dahulu dijelaskan pengertian komunikasi.

Pengertian komunikasi dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu komunikasi dalam pengertian secara umum dan pengertian secara paradigmatis. Komunikasi secara umum dapat dipahami sebagai sebuah aktivitas yang tidak terlepas dari kehidupan manusia. Komunikasi merupakan konsekuensi dari hubungan sosial (*social relations*) yang pada akhirnya memunculkan terjadinya interaksi sosial (*social interaction*).¹¹

Komunikasi dalam pengertian paradigmatis dapat dilihat dari dua segi, yaitu secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi (bahasa), istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu *communicatio*. Perkataan ini berasal dari kata *communis* yang berarti sama, dalam arti kata sama makna. Jadi komunikasi dapat

¹¹Onong Uchjana Effendy, *Dinamika Komunikasi*, cet 5 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 3.

berlangsung apabila antara orang yang berkomunikasi sama-sama memahami apa yang sedang dibicarakan.¹²

Kata *communis* merupakan istilah yang paling sering disebut sebagai asal-usul kata komunikasi. Secara terminologi komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain.¹³ Everett M. Rogers mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana pesan-pesan dioperkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah tingkah laku mereka. Proses tersebut secara sederhana dapat digambarkan dengan model S-M-C-R, yaitu sumber (*source*), mengirim pesan (*message*), melalui saluran (*channel*), kepada penerima (*receiver*).¹⁴

Hafied Cangara mengutip dari Cassandra L. Book menjelaskan bahwa sekelompok sarjana komunikasi yang mengkhususkan diri pada studi komunikasi antarmanusia (*human communication*), memberikan definisi komunikasi, yaitu:

Suatu transaksi, proses simbolik yang menghendaki orang-orang mengatur lingkungan dengan (1) membangun hubungan antarsesama manusia (2) melalui pertukaran informasi (3) untuk menguatkan sikap dan tingkah laku orang lain (4) serta berusaha mengubah sikap dan tingkah laku itu.¹⁵

Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi yang begitu luas dengan “*The act by one or more persons of sending and receiving messages distorted by noise, within a context, with some effect and with some opportunity for feedback*”.

¹²*Ibid.*, h. 4.

¹³Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, cet. 2 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), h. 41.

¹⁴Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker, *Communication of Innovations*, terj. Abdillah Hanafi (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), h. 22.

¹⁵Cangara, *Pengantar Ilmu*, h. 18.

Maksudnya, komunikasi adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau lebih dalam menyampaikan dan menerima pesan dalam suatu konteks yang menimbulkan efek dan terjadinya umpan balik meskipun dalam penyampaian pesan itu kadang-kadang mengalami gangguan.¹⁶

Berdasarkan definisi komunikasi yang telah disampaikan, terlihat adanya sejumlah komponen atau unsur yang tercakup dalam proses terjadinya komunikasi. Unsur-unsur tersebut adalah komunikator (orang yang menyampaikan pesan), pesan (pernyataan yang didukung oleh lambang), komunikan (orang yang menerima pesan), media (sarana atau saluran yang mendukung penyampaian pesan), efek (dampak dari pesan). Sedangkan teknik komunikasi adalah cara atau “seni” penyampaian suatu pesan yang dilakukan seorang komunikator kepada komunikan, sehingga menimbulkan dampak tertentu pada komunikan. Dampak yang dimaksud bisa berupa dampak kognitif, afektif maupun behavioral.¹⁷

Menurut Effendy, istilah teknik berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *technikos* yang berarti keterampilan atau kecakapan. Berdasarkan keterampilan berkomunikasi yang dilakukan komunikator, teknik komunikasi diklasifikasikan menjadi:

- a. Komunikasi informatif (*informative communication*).
- b. Komunikasi persuasif (*persuasive communication*).
- c. Komunikasi pervasif (*pervasive communication*).
- d. Komunikasi koersif (*coersive communication*).
- e. Komunikasi instruktif (*instructive communication*).
- f. Hubungan manusiawi (*human relations*).¹⁸

¹⁶Effendy, *Ilmu Komunikasi*, h. 5.

¹⁷Effendy, *Dinamika*, h. 7.

¹⁸Onong Uchjana Effendy, *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 55.

Sebahagian pakar komunikasi sebagaimana dijelaskan Andri Hasan membagi teknik komunikasi kepada komunikasi informatif, komunikasi persuasif, komunikasi instruktif dan hubungan manusiawi.¹⁹ Penjelasan masing-masing adalah sebagai berikut.

Pertama, komunikasi informatif yaitu suatu pesan disampaikan kepada seseorang atau sejumlah orang sehingga mereka dapat mengetahuinya. Teknik ini dapat berdampak kognitif karena komunikan dapat mengetahui sesuatu sesuai dengan apa yang disampaikan. Seperti halnya dalam penyampaian berita dalam media cetak maupun elektronik, pada teknik informatif ini berlaku komunikasi satu arah, pesannya bersifat umum, mediana menimbulkan keserempakan, serta komunikannya heterogen. Namun demikian teknik informatif dapat berlaku pada seseorang, seperti halnya kajian ilmu yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa.

Kedua, komunikasi persuasif yaitu komunikasi yang bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku komunikan. Komunikasi persuasif lebih menekankan pada sisi psikologis komunikan dengan cara yang halus, luwes, membujuk dan mengandung sifat-sifat manusiawi sehingga mengakibatkan kesadaran dan kerelaan yang disertai perasaan senang pada diri komunikan.

Agar komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarnya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang dengan mempergunakan komponen-komponen ilmu komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, dan komunikan. Sehingga dapat terciptanya pikiran, perasaan, dan hasil pengindraannya terorganisasi secara mantap

¹⁹Andri Hasan, *Teknik Komunikasi* (www.pjtv.co.id, 2008), h. 1-5, diakses tanggal 10 Oktober 2010.

dan terpadu. Biasanya teknik ini targetnya adalah afektif, artinya komunikasi bukan hanya sekedar tahu, tapi tergerak hatinya dan menimbulkan perasaan tertentu.

Ketiga, komunikasi instruktif disebut juga komunikasi koersif karena sama-sama dalam bentuk perintah, ancaman, sanksi yang bersifat paksaan. Orang-orang yang terkena imbas komunikasi instruktif akan melakukan sesuatu karena keadaan terpaksa. Biasanya teknik komunikasi seperti ini bersifat *fear arousing* (bersifat menakut-nakuti atau menggambarkan resiko yang buruk). Serta tidak luput dari sifat *red-herring*, yaitu interes atau muatan kepentingan untuk meraih kemenangan dalam suatu konflik, perdebatan dengan menepis argumentasi yang lemah kemudian dijadikan untuk menyerang lawan.

Keempat, hubungan manusiawi atau yang sering diterjemahkan dengan *human relations*, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hubungan tersebut tidak hanya dalam berkomunikasi, namun dalam pelaksanaannya juga terkandung nilai-nilai kemanusiaan serta unsur-unsur kejiwaan yang amat mendalam. Seperti halnya mengubah sifat, pendapat atau perilaku seseorang. Komunikasi ini termasuk juga ke dalam komunikasi interpersonal, karena komunikasinya berlangsung antara dua orang atau lebih dan bersifat dialogis. Untuk melakukan hubungan manusia biasanya digunakan beberapa teknik pendekatan yaitu pendekatan emosional (*emotional approach*) dan pendekatan sosial budaya (*socio-cultural approach*).

Teknik komunikasi di atas, memiliki beberapa tujuan atau fungsi sebagaimana dijelaskan Effendy, yaitu untuk menginformasikan (*to inform*),

mendidik (*to educate*), menghibur (*to entertain*) dan mempengaruhi (*to influence*).²⁰

Adanya komunikasi antara komunikan dengan komunikator akan dapat menambah berbagai informasi yang dapat menambah wawasan kedua belah pihak, menjadi hiburan dan dapat juga mempengaruhi sikap kearah yang lebih baik.

Terkait dengan tujuan komunikasi tersebut, maka Hanung Hizbullah Hamdah menegaskan bahwa terjadinya komunikasi antara berbagai pihak, dapat mendorong terjadinya perubahan sosial (*social change*). Atas dasar ini kata Hamdah, para praktisi komunikasi merinci tujuan ataupun fungsi komunikasi kepada beberapa tujuan, yaitu:

- a. Menciptakan kesadaran (*awareness*) terhadap gagasan/ pemilik gagasan (*merek/brand*).
- b. Mengubah persepsi.
- c. Mengubah keyakinan.
- d. Mengubah sikap (misalnya dari menolak menjadi menerima).
- e. Mengingat kembali (*reminder*).
- f. Memperkuat sikap.
- g. Mendapatkan respon langsung.
- h. Membangun citra.²¹

2. Bentuk-Bentuk Komunikasi

Teknik komunikasi yang telah dijelaskan di atas, memiliki kaitan yang erat dengan bentuk-bentuk komunikasi yang dilakukan. Menurut Hafied Cangara, para pakar komunikasi berbeda pendapat dalam menetapkan bentuk-bentuk komunikasi. Sebuah kelompok sarjana komunikasi Amerika membagi bentuk komunikasi kepada lima macam tipe, yakni komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), komunikasi kelompok kecil (*small group communication*), komunikasi organisasi

²⁰Effendy, *Ilmu, Teori*, h. 55.

²¹Hanung Hizbullah Hamdah, *Komunikasi Dakwah Melalui Pendekatan Komunikasi Pemasaran* (www.marketing communication, 2007), diakses tanggal 10 Oktober 2011.

(*organizational communication*), komunikasi massa (*mass communication*) dan komunikasi publik (*public communication*).²²

Sedangkan Effendy merangkum bentuk-bentuk komunikasi ke dalam tiga jenis, yaitu komunikasi pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi massa.²³

a. Komunikasi pribadi

Komunikasi pribadi terdiri dari dua jenis, yaitu: pertama, komunikasi intrapribadi (*intrapersonal communication*). Komunikasi intrapribadi adalah komunikasi yang berlangsung dalam diri seseorang. Orang yang bersangkutan berperan sebagai komunikator maupun sebagai komunikan. Dia berbicara pada dirinya sendiri. Pola komunikasi dengan diri sendiri terjadi karena seseorang menginterpretasikan sebuah objek yang diamatinya dan memikirkannya kembali, sehingga terjadilah komunikasi dalam dirinya sendiri.²⁴

Kedua, komunikasi antarpribadi (*interpersonal communication*), yaitu komunikasi yang berlangsung secara dialogis antara dua orang atau lebih. karakteristik komunikasi antarpribadi, yaitu: pertama, dimulai dari diri sendiri. Kedua, sifatnya transaksional karena berlangsung serempak. Ketiga, komunikasi yang dilakukan tidak hanya mencakup aspek-aspek isi pesan yang dipertukarkan, tetapi juga meliputi hubungan antarpribadi. Keempat, adanya kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Kelima, adanya saling ketergantungan antara pihak-pihak yang berkomunikasi. Keenam, tidak dapat diubah maupun diulang.

²²Cangara, *Pengantar*, h. 29.

²³Effendy, *Ilmu, Teori*, h. 57-83.

²⁴Cangara, *Pengantar*, h. 30.

Maksudnya, jika salah dalam pengucapan mungkin dapat minta maaf, tetapi itu bukan berarti menghapus apa yang telah diucapkan.²⁵

b. Komunikasi kelompok

Komunikasi kelompok (*group communication*) berarti komunikasi yang berlangsung antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari dua orang. Komunikasi tersebut bisa saja terjadi pada kelompok yang anggotanya berjumlah sedikit dan bisa pada organisasi yang anggotanya banyak. Apabila jumlah orang dalam kelompok tersebut sedikit maka komunikasi yang berlangsung disebut dengan komunikasi kelompok kecil (*small group communication*). Sebaliknya jika jumlah anggotanya banyak dinamakan dengan komunikasi kelompok besar (*large group communication*).

Michael Burgoon dan Michael Ruffner seperti yang dikutip Sendjaja menjelaskan komunikasi kelompok sebagai:

The face to face interaction of three or more individuals, for a recognized purpose such as information sharing, self maintenance, or problem solving, such that the members are able to recall personal characteristics of the other members accurately. Komunikasi kelompok adalah komunikasi tatap muka yang dilakukan tiga atau lebih individu guna memperoleh maksud atau tujuan yang dikehendaki seperti berbagai informasi, pemeliharaan diri atau pemecahan masalah sehingga semua anggota dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lainnya dengan akurat.²⁶

Dari definisi di atas, dipahami bahwa ada empat elemen yang tercakup dalam komunikasi kelompok, yaitu interaksi tatap muka, jumlah partisipan yang terlibat

²⁵S. Djuarsa Sendjadja, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Universitas Terbuka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994), h. 41.

²⁶*Ibid.*, h. 91.

dalam interaksi yang dilakukan, maksud atau tujuan yang dikehendaki dan kemampuan anggota untuk dapat menumbuhkan karakteristik pribadi anggota lain.

c. Komunikasi massa

Komunikasi massa merupakan sebuah proses penyampaian pesan melalui saluran-saluran media massa, seperti surat kabar, radio, televisi dan film yang dipertunjukkan di gedung-gedung bioskop.²⁷ Oleh karena pesan yang disampaikan bersifat massal, maka karakteristik komunikasi massa adalah bersifat umum. Artinya, pesan yang disampaikan melalui media massa terbuka untuk umum. Kemudian, pesan yang disampaikan bersifat heterogen karena ditujukan untuk seluruh anggota masyarakat. Pesan yang disampaikan juga bersifat serempak dan seragam serta hubungan antara komunikan dengan komunikator sifatnya nonpribadi.²⁸

Perlu dipahami bahwa seluruh bentuk komunikasi dan berbagai teknik yang telah dijelaskan di atas, tidak lepas dari hambatan. Menurut Effendy, hambatan tersebut ada yang disebabkan oleh sosio-antro-psikologis, hambatan semantis, hambatan mekanis dan hambatan ekologis. Hambatan sosiologi maksudnya adalah hambatan yang terjadi karena keanekaragaman masyarakat yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam status sosial, agama, ideologi, tingkat pendidikan, kekayaan dan sebagainya. Hambatan antropologis adalah hambatan yang disebabkan adanya perbedaan budaya, gaya hidup, norma, kebiasaan dan bahasa. Hambatan

²⁷ Wiryanto, *Teori Komunikasi Massa* (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 1-3.

²⁸ *Ibid.*, h. 5-8.

psikologis adalah hambatan yang terjadi karena munculnya respon negatif dari komunikan, seperti marah, kecewa dan sebagainya.²⁹

Hambatan-hambatan tersebut tidak saja menyebabkan komunikasi menjadi tidak efektif, tetapi komunikasi juga dapat menjadi statis. Hambatan tersebut bisa terjadi pada komunikan dan bisa juga terjadi pada komunikator. Hambatan yang terjadi pada diri komunikator misalnya, menyangkut pada bahasa yang dipergunakan pada saat menyampaikan informasi, sehingga komunikan tidak mengerti. Hambatan pada komunikan misalnya adalah terjadinya penolakan terhadap ide-ide yang disampaikan komunikator.

B. Pentingnya Komunikasi dalam Pembangunan

Pada hakikatnya pembangunan adalah suatu kegiatan untuk merubah sebuah keadaan kepada keadaan yang lebih baik, lebih berkualitas dan lebih maju. Dalam kamus bahasa Indonesia pembangunan disebutkan sebagai sebuah proses untuk menjadikan sesuatu lebih baik sesuai dengan apa yang dicita-citakan.³⁰ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pembangunan merupakan sebuah upaya berkelanjutan untuk melakukan perubahan, misalnya dari kurang baik menjadi baik, dari kurang sejahtera menjadi sejahtera.

Pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik. Pembangunan pada hakikatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup manusia ke tingkat yang lebih sejahtera di masa yang akan datang. Dalam kaitan itu pembangunan mempunyai arti humanisasi, atau usaha memanusiakan manusia, sehingga sebagai usaha memanusiakan manusia maka pada hakikatnya pembangunan mempunyai makna etik, baik dalam tujuan yang akan dicapai maupun cara pelaksanaannya. Dalam konteks

²⁹Effendy, *Dinamika*, h. 11-16.

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar*, h. 77.

Indonesia, makna etik yang dimaksud adalah Pancasila, sedangkan nilai-nilai Pancasila bersumber dari agama.³¹

Pembangunan dengan komunikasi memiliki hubungan yang sangat erat.

Strategi pembangunan menentukan strategi komunikasi, sehingga makna komunikasi pembangunan bergantung pada model atau paradigma pembangunan yang dipilih suatu negara. Dalam kaitan itu, para ahli menyepakati bahwa komunikasi mempunyai andil yang cukup penting dalam pembangunan. Sebagaimana disampaikan Eduard Depari:

Peran komunikasi dalam pembangunan merupakan tema pokok pembicaraan, seminar, diskusi-diskusi para ahli komunikasi, terutama dinegara-negara sedang berkembang dalam dua dasa warsa terakhir ini. Apabila kita menengok kembali pada masa 20 tahun yang lalu, maka sarana komunikasi di negara-negara berkembang masih terbatas pada media cetak. Sekarang semuanya telah berubah. Teknologi komunikasi berkembang semakin pesat, terutama radio dan televisi. Perkembangan televisi menyebabkan “jarak psikologis” mendekatkan “jarak geografis” antara bangsa.³²

Willbur Schramm juga mempunyai pandangan yang hampir sama dengan Depari, menegaskan bahwa pesan-pesan pembangunan dapat dilakukan dengan menggunakan media massa. Pendapat Schramm dilandaskan pada argumentasi bahwa media massa berfungsi sebagai, (a) sumber informasi; (b) pendorong munculnya kelompok-kelompok diskusi yang kemudian dapat membuat sebuah keputusan; (c) media pendidikan yang dapat memberikan muatan-muatan pendidikan bagi masyarakat.³³

³¹Mawardi Siregar, *Sistem Komunikasi Pemerintah dalam Pembangunan Keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2006* (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2007), h. 36.

³²Eduard Depari, *Peran Komunikasi Massa Dalam Pembangunan* (Yogyakarta: UGM Press, 1995), h. xiii.

³³Zulkarimen Nasution, *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, cet 3 (Jakarta: RajaGarafindo Persada, 2001), h. 81-92.

Rogers dan Shoemaker adalah perubahan yang diputuskan sebagai kehendak dari suatu bangsa untuk menuju sistem sosial dan ekonomi ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Dalam hal ini Rogers menyatakan bahwa komunikasi merupakan dasar untuk melakukan perubahan sosial tersebut. Perubahan sosial yang dimaksud adalah proses di mana terjadi perubahan struktur dan fungsi suatu sistem sosial.³⁴

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan pembangunan dari arah yang dicita-citakan, maka peranan komunikasi dalam pembangunan harus dikaitkan dengan arah perubahan yang diinginkan. Hal yang demikian dilakukan, karena pembangunan merupakan proses yang penekanannya pada keselarasan antara aspek kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah. Dalam pandangan Islam, pembangunan yang dicita-citakan adalah pembangunan yang berkeadilan, baik dari segi fisik material maupun mental spritual yang berlandaskan kepada Alquran dan Hadis. Pemihakan Islam kepada keadilan dan keseimbangan antara pembangunan fisik material dan spritual merupakan bahagian dari ciri-ciri utama pembangunan yang Islami.³⁵

Rasulullah saw. telah mempraktekkan hal tersebut, di mana beliau membangun secara totalitas masyarakat Arab yang kacau dan pada awalnya bodoh sekaligus tidak beradab (*jahiliyah*) menjadi masyarakat yang sangat moralis (*Islamiyah*).³⁶ Perubahan besar-besaran atas kondisi masyarakat Arab terjadi setelah Rasulullah saw. membangun manusia yang berada dalam lembah kehinaan, kenistaan dan kehancuran total kehidupan spritual moral dan fisik material. Pembangunan yang

³⁴Everett M. Rogers dan F. Floyd Shoemaker, *Communication of*, h. 16-17.

³⁵Siregar, *Sistem Komunikasi*, h. 43.

³⁶Mohammad Tohadi, *Oase Kebangsaan: Serpihan Pemikiran Soal Rakyat, Negara dan Bangsa* (Jakarta: Lembaga Kajian Wacana Indonesia, 2000), h. 3.

dilakukan Rasulullah menjadikan bangsa Arab sebagai masyarakat yang berakidah, berakhlak, memiliki rasa kekeluargaan dan ikatan sosial kemasyarakatan, sehingga tercipta tatanan peradaban yang Islami.³⁷

Pembangunan yang dilakukan Rasulullah saw. menggambarkan adanya sebuah proses perubahan sosial di tengah-tengah masyarakat Arab ketika itu. Perubahan sosial tersebut tentu saja tidak akan terjadi manakala Nabi tidak dapat membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat pluralis. Karena komunitas yang dipimpin Nabi ketika itu adalah masyarakat majemuk yang terdiri dari kaum Anshar, kaum Muhajirin, kaum Yahudi dan sisa-sisa suku Arab yang belum menerima Islam dan mereka secara terang-terangan masih menyembah berhala.

Gambaran di atas cukup menjadi argumentasi bahwa teknik komunikasi yang dilakukan memiliki kaitan dengan pencapaian cita-cita pembangunan masyarakat. Keduanya merupakan sama-sama proses yang berlangsung secara berkesinambungan. Jika komunikasi merupakan proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk merubah sikap, pendapat dan perilaku orang lain, maka pembangunan pada dasarnya juga merupakan sebuah proses. Pembangunan melibatkan minimal tiga komponen, yakni: pertama, komunikator pembangunan, dalam hal ini bisa aparat pemerintah ataupun masyarakat. Kedua, pesan pembangunan yang berisi ide-ide ataupun program-program pembangunan. Ketiga, komunikan pembangunan, yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa maupun kota yang menjadi sasaran pembangunan.

³⁷A.M. Saefuddin, *et al. Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, cet. 2 (Bandung: Mizan, 1990), h. 168-169.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa upaya untuk menyampaikan gagasan pembangunan kepada masyarakat diperlukan suatu proses komunikasi yang efektif. Sebab itu fungsi komunikasi harus senantiasa berada di garis depan untuk merubah sikap dan perilaku manusia sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan. Manusia bertugas sebagai agen utama pembangunan karena manusia diangkat Allah swt. sebagai khalifah di bumi untuk mengelola sebaik-baiknya isi alam sesuai dengan kepentingan hidup manusia.³⁸

Melihat pentingnya peranan komunikasi dalam mendukung proses terlaksananya pembangunan, maka sejak penghujung tahun 60-an, di kalangan ilmu komunikasi berkembang suatu spesialisasi disiplin ilmu komunikasi pembangunan. Pada awalnya disiplin ilmu tersebut lebih dikenal dengan *jurnalisme pembangunan, peliputan pembangunan dan komunikasi pertanian, komunikasi penunjang pembangunan.*³⁹

Perkembangan konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti luas komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi sebagai suatu aktivitas pertukaran pesan secara timbal balik di antara masyarakat dengan pemerintah, dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Sedangkan dalam arti terbatas, komunikasi pembangunan merupakan segala upaya dan cara serta teknik penyampaian gagasan dan ketrampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan

³⁸ Q.S. al-Ahzab/ 33: 72.

³⁹Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, h. 1.

diwujudkan pada masyarakat yang menjadi sasaran sehingga dapat memahami, menerima dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁴⁰

Teori yang sangat populer dalam kaitan komunikasi dengan pembangunan adalah teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Rogers. Teori difusi inovasi dapat dikategorikan ke dalam pengertian peran komunikasi secara luas dalam merubah masyarakat melalui penyebaran ide-ide dan hal-hal yang baru.

Menurut Rogers difusi adalah proses dimana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran tertentu dalam jangka waktu tertentu di antara para anggota suatu sistem sosial. Difusi adalah suatu jenis khusus komunikasi yang berkaitan dengan penyebaran pesan-pesan sebagai ide baru.⁴¹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengkajian difusi mencakup telaah tentang pesan-pesan yang berupa gagasan baru.

Sedangkan inovasi adalah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang. Tidak menjadi soal, apakah ide tersebut betul-betul baru atau tidak jika diukur dengan selang waktu sejak digunakan atau ditemukan pertama kali. Kebaruan inovasi itu diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menemukannya.⁴² Rogers selanjutnya menjelaskan bahwa ada 4 unsur penting dalam proses penyebaran dan penerimaan difusi inovasi, yaitu: (1) Inovasi yang (2) dikomunikasikan melalui saluran tertentu (3) dalam jangka waktu tertentu, kepada (4) anggota suatu sistem sosial.⁴³

⁴⁰Mukti Sitompul, *Konsep-Konsep dalam Komunikasi Pembangunan* (www.digilib USU.ac.id, 2006), h. 2. Lihat juga Nasution, *Komunikasi*, h. 128.

⁴¹Everett M. Rogers, *Diffusion of Innovation* (London: Colier MacMillan Publishers, 1983), h. 34.

⁴²Rogers dan Shoemaker, *Communication of*, h. 26.

⁴³*Ibid.*, h. 24.

Melihat unsur-unsur yang terdapat dalam teori difusi inovasi, teori tersebut dapat disejajarkan dengan model komunikasi lainnya, seperti model komunikasi S-M-C-R-E. Unsur-unsur kesamaan teori difusi inovasi dengan model komunikasi S-M-C-R-E dapat dilihat pada tabel di bawah ini.⁴⁴

Unsur-unsur dalam model Komunikasi S-M-C-R-E	Sumber S	Pesan M	Saluran C	Penerima R	Efek E
Unsur-unsur dalam difusi inovasi	- Penemu - Ilmuwan - Agen pembaru - Pemuka pendapat	Inovasi	Saluran Komunikasi: - Media massa - Media interpersonal	Anggota sistem sosial	Konsekwensi - Pengetahuan - Perubahan sikap - Perubahan tingkah laku

Pada masyarakat, khususnya di negara berkembang penyebaran inovasi terjadi terus-menerus dari satu tempat ke tempat lain, dari bidang tertentu ke bidang lain. Difusi inovasi merupakan gejala kemasyarakatan yang berlangsung bersamaan dengan perubahan sosial yang terjadi, bahkan menyebabkan suatu hubungan sebab akibat. Penyebarluasan inovasi menyebabkan masyarakat menjadi berubah, dan perubahan sosial pun merangsang orang untuk menemukan dan menyebarkan hal-hal baru. Penyebaran inovasi kepada masyarakat merupakan suatu usaha yang kompleks. Dalam penyebaran inovasi, terdapat beberapa komponen yang turut mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Di antara komponen yang dimaksud, yaitu: (1) anggota sistem sosial sebagai penerima inovasi, (2) peranan agen pembaru, (3) tokoh

⁴⁴*Ibid.*,h. 25.

masyarakat sebagai sumber bagi penyebaran ide baru, (4) saluran komunikasi yang dipergunakan dalam proses difusi.⁴⁵

Masuknya inovasi ke tengah-tengah sistem sosial masyarakat disebabkan terjadinya komunikasi antara anggota satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dalam konteks yang demikian komunikasi dipahami sebagai faktor yang sangat penting untuk terjadinya perubahan sosial. Melalui saluran-saluran komunikasilah terjadi pengenalan, pemahaman dan penilaian yang kelak akan menghasilkan penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua masyarakat dapat menerima begitu saja pembaharuan yang disampaikan. Sebab itu diperlukan suatu proses yang kadang-kadang menimbulkan pro dan kontra yang tercermin dalam berbagai sikap dan tanggapan dari anggota masyarakat ketika proses yang dimaksud sedang berlangsung di tengah-tengah mereka.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa segala sesuatu, baik ide, cara-cara, ataupun objek yang baru dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Pengertian baru tidaklah semata-mata dalam ukuran waktu sejak ditemukannya atau pertama kali digunakan inovasi tersebut. Dengan kata lain, jika suatu hal dipandang baru bagi seseorang maka hal itu merupakan inovasi. Selain itu perlu diperhatikan bahwa kebaruan suatu inovasi tidak harus sebagai pengetahuan baru, sebab jika suatu inovasi telah diketahui oleh seseorang, tetapi individu itu belum memutuskan sikap menerima atau menolak, maka baginya hal itu tetap merupakan inovasi. Jadi kebaruan inovasi tercermin dari pengetahuan, sikap, atau pun putusan terhadap inovasi yang bersangkutan.

⁴⁵*Ibid*, h. 85.

Suatu inovasi biasanya terdiri dari dua komponen, yaitu komponen ide dan komponen objek.⁴⁶ Ciri-ciri inovasi yang dirasakan oleh para anggota suatu sistem sosial menentukan tingkatan adopsi. Menurut Rogers sebagaimana dikutip Effendy ada lima ciri inovasi, yaitu:

1. Keuntungan relatif (*relative advantage*).
2. Kesesuaian (*compatibility*).
3. Kerumitan (*complexity*).
4. Kemungkinan dicoba (*trialability*).
5. Kemungkinan diamati (*observability*).⁴⁷

Kelima ciri di atas menentukan tingkat penerimaan terhadap suatu inovasi yang di difusikan kepada masyarakat. Penerimaan masyarakat terhadap suatu inovasi tidak terjadi secara serempak. Penerimaan inovasi terjadi secara berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan kesiapan penerima. Rogers mengelompokkan masyarakat (pengadopsi) ke dalam lima kelompok, yaitu:

1. Inovator (*innovators*), yaitu mereka yang pada dasarnya sudah menyenangi hal-hal yang baru dan sering melakukan percobaan.
2. Penerima dini (*early adopters*), yaitu orang-orang yang berpengaruh di sekelilingnya dan merupakan orang-orang yang lebih maju dibandingkan dengan orang-orang disekitarnya.
3. Mayoritas dini (*early majority*), yaitu orang-orang yang menerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dari orang lain.
4. Mayoritas belakangan (*late majority*), yaitu orang-orang yang baru bersedia menerima suatu inovasi apabila menurut penilaiannya semua orang di sekelilingnya sudah menerimanya.
5. Orang belakangan (*laggards*), yaitu lapisan yang paling akhir dalam menerima suatu inovasi.⁴⁸

⁴⁶*Ibid.*, h. 26.

⁴⁷Effendy, *Ilmu, Teori*, h. 284.

⁴⁸*Ibid.*, h. 286. Dalam pandangan Rogers, besarnya inovator dalam masyarakat hanya mencapai 2,5 %, adopter mencapai 13,5 %, pengikut dini dan pengikut akhir mencapai 34 %, sedangkan golongan yang kolot mencapai 16 %. Lihat, Rogers dan Shoemaker, *Communication*, h. 89.

Dalam penerimaan suatu inovasi biasanya seseorang melalui sejumlah tahapan yang disebut tahapan putusan inovasi.⁴⁹ Tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan pengetahuan, dalam tahap ini seseorang sadar dan tahu adanya inovasi dan bagaimana inovasi itu berfungsi dan memberikan keamanan baginya.
2. Tahap persuasi, yaitu seseorang sedang mempertimbangkan atau sedang membentuk sikap terhadap inovasi yang telah diketahuinya. Dalam tahapan ini seseorang lebih terlibat secara psikologis dengan inovasi.
3. Tahap putusan, dalam tahap ini seseorang membuat putusan menerima atau menolak inovasi tersebut.
4. Tahap implementasi, dalam tahap ini seseorang melaksanakan keputusan yang telah dibuatnya.
5. Tahap penegasan, yaitu dimana seseorang memastikan atau mengkonfirmasi putusan yang telah diambilnya itu.

Dalam kaitan teori difusi inovasi dengan pembangunan adalah bahwa dalam pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat. Tujuannya untuk menanamkan gagasan-gagasan, sikap mental, dan mengajarkan keterampilan yang dibutuhkan oleh suatu negara berkembang. Hal ini menegaskan bahwa komunikasi pembangunan bertujuan untuk meningkatkan

⁴⁹*Ibid.*

pembangunan manusiawi, agar kemiskinan, pengangguran dan ketidakadilan dapat dihapuskan.⁵⁰

Mengkaitkan peranan komunikasi pembangunan dengan konsep pembangunan, Madjid Tehranian mengemukakan tiga tinjauan teoritis, yaitu teori yang hanya melihat pembangunan semata-mata sebagai proses pluralisasi masyarakat, politik dan ekonomi dari suatu bangsa yang melaksanakan pembangunan tersebut. Pandangan ini dianut oleh para ekonom dan politisi liberal. Pada pokoknya mereka berpendapat bahwa hal yang penting dalam pembangunan adalah peningkatan kelompok tenaga kerja yang berdasarkan struktur dan fungsi yang jelas. Teori kedua penekanannya pada peningkatan rasionalisasi sebagai unsur kunci proses pembangunan. Penganut aliran ini adalah G.W.F. Hegel, yang menekankan peranan ratio dalam perkembangan sejarah. Sedangkan Max Weber mementingkan rasionalisasi kebudayaan dan birokrasi dari suatu proses sosial yang akhirnya dikenal belakangan ini adalah mendewakan negara sebagai sumber segala kemenangan dan keabsahan. Teori ketiga adalah pemikiran yang lahir dari kesadaran diri masyarakat dunia ketiga, dengan konsep yang berpusat pada prinsip melakukan pembebasan. Teori ini sangat dipengaruhi oleh aliran Neo Marxis.⁵¹

Berdasarkan uraian di atas, dapat diasumsikan bahwa dalam teori yang pertama pembangunan bertujuan untuk meningkatkan penghasilan dan pendapatan masyarakat yang melaksanakan pembangunan tersebut. Tetapi konsep ini tidak memperhatikan apakah peningkatan tersebut atau hanya oleh segelintir masyarakat tertentu. Asumsi teori kedua lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat

⁵⁰Nasution, *Komunikasi Pembangunan*, h. 128.

⁵¹Sitompul, *Konsep-Konsep*, h. 6.

abstrak, rasio, cara berpikir yang bukan berbentuk wujud nyata. Sedangkan asumsi yang ketiga adalah proses pembangkitan kesadaran sejarah dan identitas diri yang otentik sebagai daya motivasi dalam rangka proses revolusi dominasi dan eksploitasi.

C. Konsep Masyarakat Madani

1. Sejarah dan Pengertian Masyarakat Madani

Wacana masyarakat madani akhir-akhir ini hangat dibicarakan, tidak hanya oleh kalangan akademisi, tetapi termasuk kalangan pejabat pemerintah, politisi, cendekiawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya upaya untuk melakukan penataan kembali sistem kehidupan berbangsa dengan merujuk kepada konsep masyarakat madani. Namun sebelum lebih jauh berbicara tentang masyarakat madani, terlebih dahulu disinggung sejarah dan pengertian masyarakat madani.

Perlu dipahami bahwa padanan kata masyarakat madani dalam literatur bahasa Indonesia agak sulit dijumpai, karena istilah tersebut berasal dari bahasa Arab. Sulitnya mencari padanan kata masyarakat madani menyebabkan munculnya pemadanan kata masyarakat madani dengan istilah *civil society*. Istilah ini kemudian diintrodusir lewat wacana akademik ke-Indonesiaan yang dimotori oleh pemikir-pemikir muslim, seperti halnya Nurcholis Madjid.

Orang pertama yang mengemukakan istilah *civil society* ialah Cicero dalam filsafat politiknya, dengan istilah *societies civilis* (bahasa Romawi) atau *koinonia politike* (bahasa Yunani). Dari sini dapat dilihat bahwa istilah masyarakat madani dan *civil society* berasal dari dua sistem budaya yang berbeda. Masyarakat madani

merujuk pada tradisi Arab-Islam, sedangkan *civil society* merujuk pada tradisi Barat non-Islam yang kemudian pengertiannya mengalami perkembangan.⁵²

Disamping penyebutan kedua istilah di atas berbeda, dalam pengaplikasiannya juga berbeda. *Civil society* telah teruji secara terus menerus dalam tatanan politik Barat hingga turut membidani lahirnya peradaban Barat modern. Sedangkan masyarakat madani merupakan konsep *ummah* yang merujuk pada masyarakat Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. Secara historis, masyarakat madani yang dibangun Nabi hanya sebentar, tetapi mampu memberikan makna yang sangat penting bagi masyarakat sekarang dan masa yang akan datang. Praktik itulah yang selanjutnya disejajarkan oleh sejumlah pemikir muslim dengan *civil society*.⁵³

Kalangan pemikir muslim menganggap bahwa masyarakat kota Madinah merupakan *prototype* masyarakat ideal produk Islam yang dapat dipersandingkan dengan masyarakat ideal dalam konsep *civil society*. Nabi Muhammad saw. sebagai penggagas utama tatanan masyarakat Madinah, telah berhasil memberlakukan nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan bagi semua warga, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas.⁵⁴

Dalam kaitannya dengan konteks ke-Indonesiaan, istilah masyarakat madani lahir dari gagasan Dato Anwar Ibrahim ketika menyampaikan ceramah dalam

⁵²Achmad Jainuri, "Agama dan Masyarakat Madani: Rujukan Khusus tentang Sikap Budaya, Agama, dan Politik (Sebuah Pengantar)," dalam Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun*, h. vii.

⁵³*Ibid.*, h. viii.

⁵⁴Toha Hamim, "Islam dan Masyarakat Madani, HAM, Pluralisme dan Toleransi Beragama," dalam Koran Harian Jawa Pos (11 Maret 1999), h. 4. Dalam penataan negara yang baru saja dibangun, Nabi memakai Islam sebagai penata sistemnya. Nabi menetapkan dasar negara berdasarkan takwa, yaitu takwa kepada Allah swt. Sementara politik negara berdasarkan kepada perikemanusiaan (*al-adāt al-insāniyah*), demokrasi (*asy syûra*), persatuan Islam (*al-wahdat al-Islāmiyah*), dan persaudaraan Islam (*ukhwat al-Islāmiyah*). Lihat, Tohadi, *Oase*, h. 5.

simposium nasional pada festival Istiqlal tanggal 26 September 1995. Gagasan Ibrahim diilhami dari kondisi kelemahan dan keterbelakangan umat Islam rantau yang mayoritasnya adalah muslim. Ia menyimpulkan bahwa prinsip dan ide masyarakat madani adalah moral, keadilan, keseksamaan, musyawarah dan demokrasi, di mana agama sebagai sumbernya dan peradaban sebagai prosesnya dan masyarakat kota adalah hasilnya.⁵⁵

Dari pandangan tersebut disimpulkan bahwa dalam masyarakat madani terkandung tiga hal, yakni agama, peradaban dan perkotaan. Agama menjadi prinsip dasar dalam penataan masyarakat untuk mewujudkan kota yang berperadaban. Inilah sesungguhnya yang kemudian menjadi kata kunci keberhasilan Nabi dalam mempersatukan pluralisme dalam satu kota, di mana masyarakatnya diikat dengan satu ikatan perjanjian yang disebut Piagam Madinah.

Dalam Piagam Madinah, komunitas muslim dan Yahudi dipersatukan dalam satu ikatan umat. Pertama, antara muslim dan Yahudi terikat dalam satu wilayah, sehingga mereka harus hidup bekerjasama. Keduanya hidup berdampingan dalam mewujudkan tujuan bersama, yaitu kehidupan yang rukun dan damai. Ketiga, mereka mengakui dan menerima Nabi Muhammad saw. sebagai pemimpin tertinggi atau pemegang otoritas politik yang legal dalam kehidupan mereka.⁵⁶

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikatakan bahwa bentuk masyarakat madani adalah suatu komunitas masyarakat yang memiliki kemandirian. Perkembangannya sesuai dengan potensi agama, budaya, adat istiadat, nilai-nilai

⁵⁵Sufiyanto, *Masyarakat*, h. 93-95.

⁵⁶J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*, (Jakarta: Rajawali Press dan LSIK, 1994), h. 68.

keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme) dan perlindungan terhadap kaum minoritas.

2. Ciri-Ciri Masyarakat Madani dan Beberapa Prinsip yang Diterapkan di Dalamnya

Masyarakat Madani yang diorganisir Nabi, sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pemerintahan yang membawa kepada terbentuknya suatu umat. Di antara ciri-ciri masyarakat madani tersebut, yaitu universalitas, supermasi, keabadian, dan pemerataan kekuatan adalah empat ciri yang pertama. Ciri yang kelima, ditandai dengan kebaikan dari dan untuk bersama. Keenam, bertujuan untuk meraih kebajikan umum. Ketujuh, memiliki keseimbangan. Kedelapan, memiliki piranti eksternal untuk mewujudkan tujuannya. Kesembilan, masyarakat madani bukanlah sebuah kekuatan yang berorientasi pada keuntungan melainkan masyarakat yang dapat memberi manfaat. Kesepuluh, menjunjung pluralitas.⁵⁷

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa masyarakat madani adalah masyarakat yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan umum yang disebut dengan *al-khair*. Sedangkan prinsip-prinsip yang diterapkan di dalamnya adalah merujuk kepada Piagam Madinah yang menurut Suyuthi memuat beberapa prinsip yang memuat:⁵⁸

Pertama, prinsip umat. Prinsip ini menggambarkan bahwa masyarakat Madinah yang dibangun Nabi adalah masyarakat yang terdiri dari suatu jamaah manusia inklusif. Meskipun terdiri dari beberapa kelompok sosial, tapi mereka

⁵⁷Mufid, *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani* (www.umm.ac.id, 1999), h. 2. diakses tanggal 10 Oktober 2010.

⁵⁸Pulungan, *Prinsip-Prinsip*, h. 125-217.

terikat dengan ikatan sosial kemanusiaan yang dapat menyatukan mereka di tengah keberagaman.

Kedua, persatuan dan persaudaraan. Prinsip ini mencerminkan bahwa persatuan dan persaudaraan yang dibangun Nabi adalah persatuan dan persaudaraan yang inklusif, mencakup semua golongan Islam dan non-Islam. Sebab itu persatuan dan persaudaraan yang diletakkan Nabi dapat dikatakan pertama dalam sejarah kemanusiaan.

Ketiga, prinsip kebebasan. Dalam membangun masyarakat madani, Nabi juga menerapkan prinsip kebebasan. Bebas dalam arti melakukan adat kebiasaan yang baik, bebas dari kekurangan, bebas dari penganiayaan, bebas dari rasa takut, bebas berpendapat, bebas menjalankan dan memeluk agama yang mereka yakini.

Keempat, prinsip musyawarah. Prinsip ini menggambarkan bahwa seluruh perkara diselesaikan lewat musyawarah untuk mufakat. Ini berarti bahwa musyawarah merupakan salah satu faktor terbentuknya masyarakat madani.

Kelima, prinsip keadilan. Prinsip ini mencerminkan bahwa keadilan bukan hak satu golongan melainkan hak setiap orang. Keadilan juga menjadi sendi sosial masyarakat Madinah yang menuntut setiap warga negara berlaku adil dalam menyelesaikan setiap masalah, seperti membayar diat, menebus tawanan dan menegakkan hukum secara adil.

Keenam, prinsip penegakan hukum. Prinsip ini dalam ketetapan Piagam Madinah terfokus pada pemberian sanksi hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran peraturan. Sebaliknya bagi orang yang berlaku baik, patuh pada peraturan akan dijamin keamanannya.

Prinsip-prinsip yang telah diuraikan di atas, merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan, jika sebuah negara ingin mewujudkan masyarakat madani. Dalam konteks ke-Indonesiaan, secara sederhana dapat dirumuskan bahwa tatanan masyarakat madani akan terwujud, jika keadilan, keterbukaan, toleransi dan juga pluralisme, menjadi prinsip utama yang harus dijalankan.

3. Hubungan Masyarakat Madani dengan Aspek Lainnya

Masyarakat madani memiliki kaitan yang erat dengan beberapa aspek lainnya, seperti demokrasi, toleransi, pluralisme, HAM dan keadilan sosial.

a. Masyarakat Madani dan Demokrasi

Demokrasi sering dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan negara dimana dalam pokoknya semua orang (rakyat) memiliki hak yang sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah. Lebih jelasnya, ditinjau dari sudut bahasa, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* (*kratein*) berarti kekuasaan/ berkuasa. Dengan demikian secara sederhana demokrasi diartikan dengan “Rakyat berkuasa atau *government or rule by the people*.”⁵⁹

Dalam kaitannya dengan masyarakat madani, dapat dipahami bahwa demokrasi merupakan sebuah konsep politis yang berguna untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Demokrasi dalam pandangan Nurcholis Madjid adalah sebagai kategori dinamis. Demokrasi merupakan salah satu syarat mewujudkan masyarakat madani. Sebuah negara dapat disebut demokratis jika negara yang

⁵⁹Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1992), h.50.

bersangkutan menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan dapat memberi hak yang sama kepada masyarakat, baik individu maupun sosial.⁶⁰

Salah satu nilai demokrasi tersebut menurut Nurcholis Madjid adalah persamaan (egalitarianisme). Prinsip egaliter adalah prinsip yang terdapat dalam Islam. Egalitarianisme dalam pengertian Islam adalah adanya persamaan, keadilan, eksistensi dan demokrasi.⁶¹

b. Masyarakat Madani dan Pluralisme

Islam sangat menghargai pluralisme. Gambaran penghargaan Islam terhadap pluralisme dapat dirujuk kepada sejarah masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah. Antara kaum Muhajirin, Anshar, Yahudi dan Nasrani tercipta suasana hidup yang kondusif. Dalam kaitan itu Nurcholis Madjid menegaskan bahwa pluralisme tidak dapat dipahami hanya dengan mengatakan bahwa masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebhinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban.⁶²

Kaitannya dalam mewujudkan cita-cita masyarakat madani di Indonesia, dapat dipahami bahwa secara fisik bangsa Indonesia memiliki 13.000 pulau. Dalam pulau-pulau tersebut terdapat subetnis yang dengan pelbagai macam corak ragam bahasa dan adat istiadat. Hal tersebut merupakan sebuah realitas yang tidak mungkin

⁶⁰Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun*, h. 124.

⁶¹Zuly Qodir, *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Aksi Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 84.

⁶²Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun*, h. 139.

ditolak. Sebab itu bangsa Indonesia harus mampu mengakomodir seluruh potensi yang ada untuk mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan.⁶³

c. Masyarakat Madani dan HAM

Konsep masyarakat madani yang dicita-citakan dewasa ini telah mengambil peran sebagai sebuah agenda cita-cita masyarakat modern. Sebagaimana diungkapkan Nurcholis Madjid bahwa puncak dari misi suci Nabi adalah terselenggaranya pidato perpisahan, yakni *khutbah al wada'*. Dalam pidato itulah pertama kali Nabi kata Nurcholis Madjid memperkenalkan konsep hak azasi dengan inti dan titik tolak kesucian hidup, harta dan martabat kemanusiaan.⁶⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penghargaan terhadap Hak Azasi Manusia, merupakan elemen penyangga bagi terwujudnya masyarakat madani. Bertitik tolak dari nilai kemanusiaan, maka hakekat hak-hak azasi manusia itu ialah membangun kebebasan yang manusiawi, termasuk kebebasan berpendapat, penghargaan terhadap martabat manusia.

d. Masyarakat Madani dan Keadilan Sosial

Nurcholis Madjid mengklasifikasikan keadilan kedalam beberapa bagian. Pertama, keadilan mengandung pengertian perimbangan atau keadaan seimbang. Kedua, keadilan mengandung makna persamaan. Pengertian keadilan tidak utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penunaian hak kepada siapa saja yang berhak.⁶⁵

⁶³Qodir, *Pembaharuan*, h. 88.

⁶⁴Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun*, h. 144.

⁶⁵Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 513-515.

Apa yang dijelaskan Madjid telah terapkan pada masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw. Dalam masyarakat Madinah Nabi berlaku adil kepada setiap anggota masyarakat. Dengan demikian, keadilan merupakan salah satu penyangga bagi terbentuknya masyarakat madani. Relevansinya dengan masyarakat Indonesia, dapat ditegaskan bahwa keadilan dalam berbangsa dan bernegara sangatlah dibutuhkan. Ketidakadilan akan menyebabkan munculnya gerakan-gerakan spratis yang memicu terjadinya disintegrasi dan perpecahan.

D. Kajian Terdahulu

Dari penelusuran yang dilakukan, penelitian tentang teknik komunikasi pemerintah dalam membangun masyarakat madani di Kota Langsa belum pernah dilakukan. Namun teori-teori yang bersesuaian dengan penelitian ini sudah banyak dilakukan oleh mahasiswa pascasarjana IAIN SU Medan.

Di antara penelitian yang berhubungan dari sisi teori adalah penelitian Mawardi Siregar yang berjudul "Sistem komunikasi pemerintah dalam pembangunan keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005-2006." Penelitian lainnya adalah Ahmad Sampurna yang berjudul "Sistem komunikasi Badan Koordinasi Agama Islam (BKIA) dalam meningkatkan pengamalan agama karyawan pada perusahaan PTPN III Kebun Merbau Selatan Labuhan Batu." Keduanya adalah penelitian tesis pascasarjana IAIN SU Medan tahun 2007.

Penelitian Mawardi Siregar melihat kepada sistem komunikasi yang dilakukan pemerintah untuk menyukseskan pembangunan keagamaan di Tapanuli Selatan. Sehingga hasil penelitian terfokus kepada proses penyampaian pesan yang

dilakukan pemerintah kepada masyarakat, yaitu proses komunikasi sekunder dan primer.⁶⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sampurna tentang “Sistem komunikasi Badan Koordinasi Agama Islam (BKAI) dalam meningkatkan pengamalan agama karyawan PTPN III Kebun Merbau Selatan Labuhan Batu. Penelitian Ahmad Sampurna terfokus pada sistem pengkomunikasian pesan-pesan Islam yang dilakukan pengurus BKIA dalam meningkatkan keikutsertaan para karyawan untuk mengikuti pengajian yang dilaksanakan.”⁶⁷

Dengan demikian, penelitian ini berbeda dengan kedua kajian terdahulu yang telah diuraikan di atas. Penelitian ini terfokus kepada penelitian teknik komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun masyarakat madani dalam konteks Kota Langsa pascaperjanjian damai RI-GAM di Helsinki. Penelitian ini juga mencoba untuk mengetahui lebih mendalam kecenderungan teknik komunikasi yang diterapkan pemerintah kepada masyarakat Kota Langsa dalam mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan.

⁶⁶Siregar, *Sistem Komunikasi*, h. 67-103.

⁶⁷Ahmad Sampurna, *Sistem Komunikasi Badan Koordinasi Agama Islam (BKIA) dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Karyawan pada Perusahaan PTPN III Kebun Merbau Selatan Labuhan Batu* (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2007), h. 64

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, karena titik fokus penelitian adalah pada observasi dan suasana alamiah (*naturalistic setting*).⁶⁸ Dikatakan juga sebagai penelitian naturalistik (*naturalistic inquiry*), karena penelitian ini berusaha memahami objek yang sedang diteliti secara apa adanya, tidak dimanipulasi melainkan dipahami melalui analisis alamiah.⁶⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu pendekatan yang bertujuan menggambarkan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara faktual dan cermat.⁷⁰

Penelitian deskriptif bertujuan untuk membuat pecandraan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah yang sedang diteliti.⁷¹

Pendekatan deskriptif kualitatif juga bertujuan untuk mendapatkan uraian mendalam tentang ucapan, tulisan dan tingkah laku yang dapat diamati dalam setting tertentu dan dikaji dari sudut pandang yang utuh.⁷²

⁶⁸Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi Dilengkapi Contoh Analisis Statistik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984), h. 25.

⁶⁹Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 157-159.

⁷⁰Rakhmat, *Metode.*, h. 22.

⁷¹Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005), h. 75.

⁷²Rosyadi Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), h. 213. Lihat juga Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. 22 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 3-4.

Dalam penelitian ini, subjek yang diteliti adalah teknik komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa.

B. Informan Penelitian

Sebagaimana tradisi yang berlaku pada penelitian kualitatif diperlukan informan kunci yang dianggap mampu memberikan data, maka penelitian ini juga menggunakan informan kunci yang diambil dengan teknik *purposive*. Teknik ini selanjutnya dikembangkan dengan strategi *snowball sampling* sampai data yang dibutuhkan terpenuhi.

Sebagai informan kunci dalam penelitian ini ditetapkan sebanyak empat orang yang diambil dari pemerintah Kota Langsa. Adapun keempat orang tersebut, yaitu:

1. Walikota Langsa
2. Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi
3. Kepala Dinas Syariat Islam Kota Langsa
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Langsa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data skunder. Data primer bersumber dari keempat orang informan yang telah disebutkan di atas. Sedangkan data skunder atau data pendukung diperoleh dari

dokumentasi yang dimiliki pemerintah Kota Langsa, kemudian bahan-bahan bacaan, koran, jurnal, majalah, buku-buku yang relevan dengan objek penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga macam cara, yaitu:

1. Wawancara mendalam (*in depth interview*).

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan para informan. Adapun hal-hal yang diwawancarai tentang keterkaitan dengan teknik komunikasi pemerintah dalam membangun masyarakat madani di Kota Langsa.

2. Observasi berperan serta (observasi partisipan). Dalam hal ini penulis mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Langsa. Peneliti juga mengobservasi secara langsung keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.
3. Studi dokumen. Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa dokumentasi milik pemerintah Kota Langsa dan merujuk bahan-bahan bacaan yang relevan.

E. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan terus menerus sejak awal penelitian hingga berakhir. Untuk memudahkan analisis data, peneliti melakukan tahapan-tahapan analisis, sebagaimana dijelaskan Moleong sebagai berikut:

1. Menelaah dan mempelajari data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data yang bersifat primer maupun sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Mereduksi data dengan membuat rangkuman berupa pernyataan-pernyataan sehingga analisis semakin tajam dan lebih sistematis.
3. Menyusun data dalam satuan-satuan analisis.
4. Memeriksa kembali keabsahan data sehingga yang dideskripsikan dalam bentuk kalimat adalah data-data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Mendeskripsikan berarti membuat sesuatu yang kompleks dapat dimengerti dengan menguraikan ke dalam komponen-komponen.⁷³
5. Mengambil kesimpulan dengan cara induktif abstraktif, yaitu kesimpulan yang bertitik tolak dari yang khusus ke umum.

F. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga dengan menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik memperpanjang keikutsertaan peneliti karena semakin lama peneliti ikut langsung dalam penelitian kemungkinan data akan lebih terjaga keabsahannya. Sehubungan dengan teknik triangulasi sumber, peneliti melakukannya dengan jalan yaitu :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

⁷³Boy S. Sarbaguna, *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 2004), h. 71. Lexy. J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), h. 190.

2. Membandingkan apa yang dikatakan seseorang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁷⁴

⁷⁴Moleong, *Metode Penelitian*, h. 326-331

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Kehidupan Masyarakat Kota Langsa

Sebelum komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dibahas lebih jauh, terlebih dahulu dipaparkan sekilas tentang kondisi sosio demografi Kota Langsa. Gambaran kondisi tersebut sangat erat kaitannya dengan komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam membangun Kota Langsa menjadi kota yang madani. Kondisi sosio demografi yang dimaksud akan diuraikan mulai dari sejarah berdirinya Kota Langsa, letak geografis, kondisi sosial masyarakat, kondisi keagamaan dan kondisi.

5. Kondisi Geografis Kota Langsa

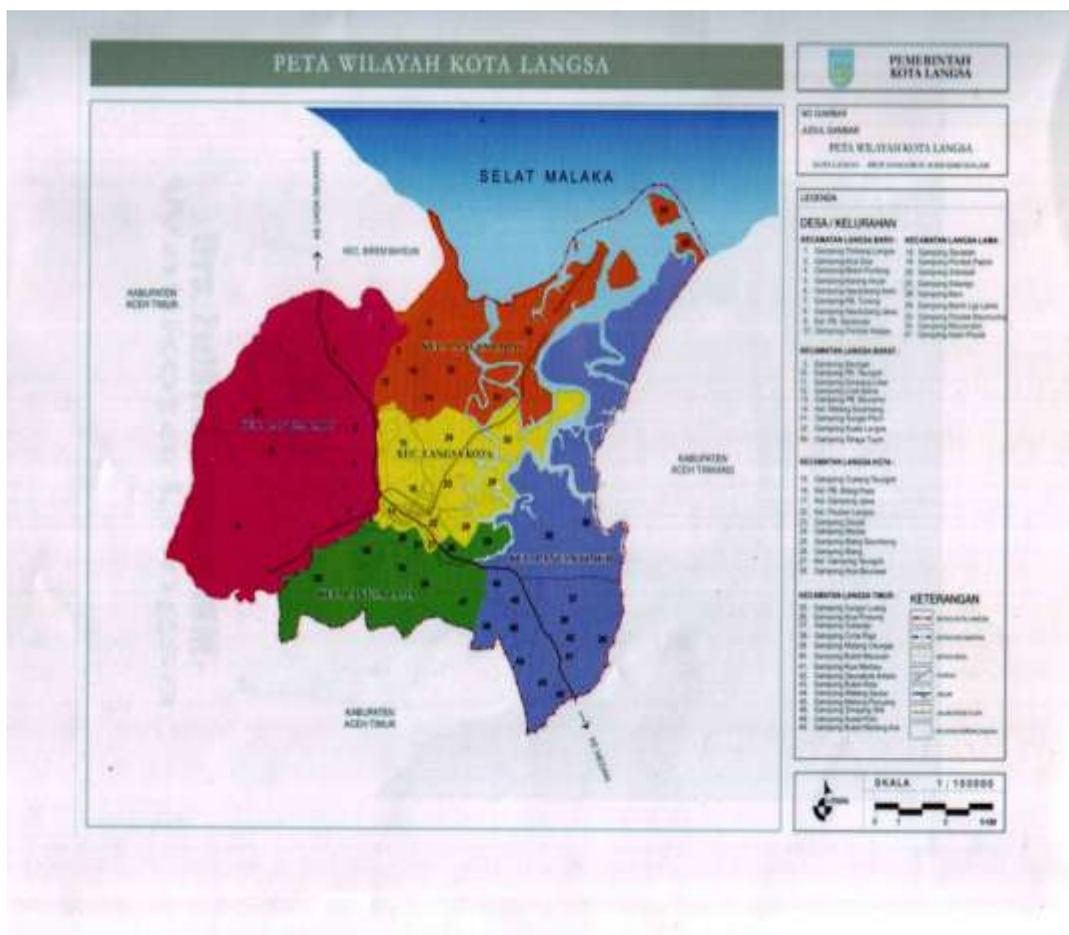
Kota Langsa adalah salah satu daerah otonom baru dalam propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kota Langsa merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Aceh Timur di mana sebelumnya adalah kota administratif. Dasar hukum pembentukan Kota Langsa yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2001, tanggal 21 Juni dan peresmiannya dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2001. Pengesahan Kota Langsa sebagai daerah otonom baru diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden Republik Indonesia.

Luas wilayah Kota Langsa berdasarkan Undang-Undang No. 3 tahun 2001 adalah seluas 262,41 Km². Kota Langsa terdiri dari lima kecamatan, 51 wilayah gampong/desa. Secara administratif, Kota Langsa berbatasan dengan dua kabupaten dan satu selat, yaitu:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Selat Malaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Aceh Tamiang.

Kota Langsa mempunyai dataran rendah dan bergelombang, berada pada ketinggian antara 0 sampai dengan 25 meter dari permukaan laut. Daerah yang berada pada ketinggian 0 meter umumnya terdapat di wilayah Kecamatan Langsa Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta Kota Langsa :

Gambar 4.1. Peta Kota Langsa



6. Kondisi Sosial Kemasyarakatan

Kota Langsa termasuk dalam kategori daerah pesisir karena jaraknya yang sangat dekat dengan pantai. Jarak Kota Langsa dengan pantai hanya lebih kurang lima kilometer. Penduduknya sangat heterogen dan umumnya berdomisili di pusat perkotaan. Berdasarkan data statistik tahun 2009, tercatat bahwa jumlah seluruh penduduk Kota Langsa adalah sebanyak 140.415 jiwa, terdiri dari 72.199 jiwa laki-laki dan 73.152 jiwa perempuan.⁷⁵

Penduduk Kota Langsa terdiri dari suku Aceh, Jawa, Melayu, Gayo, Batak, dan Karo. Meskipun sukunya berbeda-beda, tetapi identitas kebersamaan dibangun masyarakat berdasarkan ikatan kebudayaan dan agama. Dalam pergaulan sehari-hari, penduduk Kota Langsa lebih suka disebut sebagai orang Aceh.

Kota Langsa merupakan kota kecil dengan keramaian yang terpusat di dua titik, yaitu jalan Teuku Umar dan jalan Ahmad Yani. Jalan Teuku Umar merupakan pusat pertokoan dan pasar tradisional. Tempat ini selalu ramai dikunjungi masyarakat sejak pagi sampai malam hari. Sedangkan Jalan Ahmad Yani adalah jalan protokol dua jalur yang membelah kota Langsa dan selalu dipadati warga.

Mata pencaharian pokok penduduk Kota Langsa, sebahagian besar adalah berdagang dan bertani. Di samping itu, ada juga yang bekerja sebagai nelayan dan pembuat arang dari pohon bakau, terutama masyarakat yang bermukim di sepanjang pantai. Adapula yang menjadi buruh bangunan dan pegawai negeri.

⁷⁵Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa, *Kota Langsa dalam Angka* (Langsa: BPS Kota Langsa, 2009), h. 19.

Pada zaman dahulu, masyarakat Kota Langsa dikategorikan kepada empat golongan, yaitu golongan keluarga sultan, golongan *uleebalang*, golongan ulama, dan golongan rakyat biasa. Golongan keluarga sultan merupakan keturunan bekas sultan-sultan yang pernah berkuasa. Panggilan yang lazim untuk keturunan sultan adalah *teuku* untuk laki-laki dan *cut* untuk perempuan. Golongan *uleebalang* adalah orang-orang keturunan bangsawan yang menguasai daerah-daerah kecil di bawah kerajaan. Para ulama atau pemuka agama lazim disebut *teungku* atau *Abu*. Sedangkan rakyat biasa adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah Kota Langsa.

Penggolongan sosial sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Dalam kajian sosiologi, munculnya stratifikasi dalam masyarakat tidak lebih disebabkan oleh munculnya kekaguman terhadap kepemilikan seseorang terhadap sesuatu yang berharga, misalnya memiliki banyak harta, kekuasaan yang luas dan sebagainya. Kondisi inilah yang menyebabkan munculnya kelas-kelas sosial pada masyarakat yang dibagi kepada kelas atas (*upper class*), menengah (*middle class*), dan bawah (*lower class*).

Seiring dengan perkembangan zaman, sistem penggolongan sosial yang ada pada masyarakat Kota Langsa sebagaimana telah dijelaskan di atas, ternyata tidak berlaku lagi dewasa ini. Stratifikasi sosial pada masyarakat Kota Langsa tidak lagi didasarkan pada kekuasaan atau gelar semata, tetapi orang yang memiliki stratifikasi sosial tinggi dinilai dari kekayaan, pendidikan, dan berikutnya kekuasaan. Bagi masyarakat Kota Langsa, orang terpandang adalah orang-orang yang berpendidikan. Hal ini terindikasi dari tingginya penghargaan masyarakat

terhadap orang berpendidikan. Dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, yang selalu dikedepankan adalah orang-orang yang sudah berpendidikan.

Menurut pandangan penulis, penempatan orang berpendidikan pada stratifikasi paling atas, merupakan bukti semakin tumbuhnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Realitas ini juga harus diakui sebagai gejala alamiah dan lazim dalam kehidupan manusia. Kondisi ini juga, sekaligus mengindikasikan dinamisnya kehidupan sosial pada masyarakat Kota Langsa. Adapun orang-orang yang menduduki lapisan tertentu dibentuk bukan berdasarkan atas kesengajaan yang disusun sebelumnya oleh masyarakat, tetapi berjalan secara alamiah dengan sendirinya.

Dalam kajian sosiologi, sistem pelapisan sosial pada masyarakat Kota Langsa, dapat dikategorikan sistem pelapisan terbuka. Artinya, setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk jatuh ke pelapisan paling bawah, dan sebaliknya dapat naik ke pelapisan paling atas. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkiprah di masyarakat sepanjang orang tersebut memiliki kompetensi untuk melakukan hal tersebut. Statifikasi sosial pada pelapisan terbuka ini sangat ditentukan oleh mobiltas seseorang dalam masyarakat. Semakin tinggi mobiltas sosial seseorang dalam masyarakat, maka status sosialnya bisa semakin tinggi di mata masyarakat. Mobiltas sosial ini dapat dilihat dari tiga jenis, yaitu gerak sosial yang meningkat (*social climbing*), gerak sosial menurun (*social sinking*) dan gerak sosial horizontal. Ketiga jenis mobiltas sosial dapat dialami oleh siapa

saja sesuai dengan bagaimana seseorang mengekspresikan lingkungan sosial dan bagaimana lingkungan sosial mengekspresikan seseorang secara timbal balik.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian juga diperoleh bahwa, masyarakat Kota Langsa tinggal dalam kesatuan hidup terkecil yang disebut *gampong* (desa) yang dikepalai oleh seorang kepala desa (*geuchik*). Kumpulan dari beberapa *gampong* disebut *mukim* yang dipimpin oleh seorang *imeum mukim*. Kehidupan sosial dan keagamaan di setiap *gampong* dipimpin oleh pemuka-pemuka adat dan agama, seperti *imeum meunasah*, *teungku khatib*, *tengku bile*, dan *tuha peut* (penasehat adat). Hal ini secara tegas diatur pada bab XV Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.⁷⁷

Dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masyarakat Kota Langsa hidup dalam lingkungan terkecil berupa desa, dengan status suku yang berbeda, agama dan ras yang berbeda, namun interaksi sosial di antara masyarakat terjaga dengan baik. Interaksi antara masyarakat berlangsung secara intensif di pasar-pasar, di perkantoran dan tempat-tempat umum lainnya. Masyarakat Kota Langsa dalam hal ini memiliki persaudaraan yang kuat. Persaudaraan tersebut terjalin kokoh tidak hanya karena merasa satu suku, tetapi dikuatkan juga dengan perasaan seiman dan seakidah. Inilah salah satu faktor yang menjadikan Kota Langsa sebagai kota yang aman dan dinamis.

⁷⁶J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004), h. 188.

⁷⁷Dalam bab XV Pasal 114 -115 diatur tentang *mukim* dan *gampong*. Pada pasal 115 ayat 1 disebutkan "bahwa dalam wilayah kabupaten/ kota dibentuk *gampong* atau nama lain. Kemudian pada ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah *gampong* terdiri dari *keuchik* dan Badan Permusyawaratan *gampong* yang disebut *tuha peut*. Pada pasal 114 ayat 1 dijelaskan bahwa dalam wilayah kabupaten/ kota dibentuk mukim yang terdiri dari beberapa *gampong*. Ayat 2 menjelaskan bahwa *mukim* dipimpin oleh imeum mukim dan fungsinya akan dibantu oleh beberapa orang (*tuha pet*). Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, h. 147-148.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kehidupan sosial pada masyarakat Kota Langsa, tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Aguste Comte, bahwa setiap masyarakat memiliki dua sistem kehidupan yang berbeda. Tetapi keduanya tetap menjadi sistem yang tidak terpisahkan dari sebuah masyarakat secara umum. Pertama, *social statics* (statika sosial atau sturuktur sosial) berkaitan dengan sturuktur sosial masyarakat berupa kelompok dan lembaga-lembaga sosial, lapisan serta kekuasaan. Kedua, *social dynamic* (dinamika sosial atau perubahan sosial) berkaitan dengan fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses sosial, perubahan sosial dan interaksi sosial.⁷⁸

7. Kondisi Keagamaan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Langsa, terdapat tiga macam pemeluk agama yang berbeda-beda tinggal di Kota Langsa, yaitu agama Islam, Kristen dan Budha. Masing-masing pemeluk memiliki sarana ibadah. Di Kota Langsa terdapat sebanyak 57 masjid, 89 mushalla, satu gereja dan satu vihara.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan, meskipun penduduk Kota Langsa berbeda dari segi agama, namun harmonisasi antara pemeluk agama terjalin dengan baik. Demikian juga dengan interaksi yang berlangsung, hampir terlihat tidak ada sekat-sekat yang menghalangi antara satu pemeluk agama dengan pemeluk agama lainnya untuk berinteraksi. Hal ini disebabkan tingginya kesadaran masyarakat dalam

⁷⁸Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 41.

menjunjung tinggi perbedaan. Di samping itu, perbedaan tersebut juga mendapat jaminan dari pemerintah Kota Langsa dan pemerintah Aceh.⁷⁹

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pada dasarnya masyarakat Kota Langsa adalah masyarakat yang religius yang mampu menjalankan aturan agamanya masing-masing sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat itu sendiri. Dan mereka saling menghormati antara satu agama dengan agama yang lain. Hal ini tidak terlepas dari komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa.⁸⁰

8. Kondisi Pendidikan

Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berkualitas, perhatian pemerintah Kota Langsa tidak lepas dari dunia pendidikan. Pemerintah Kota Langsa meningkatkan pendidikan dengan melakukan pembenahan gedung sekolah dan meningkatkan kesejahteraan guru melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah NAD. Dari upaya tersebut, prestasi yang diraih siswa Kota Langsa semakin meningkat. Sebagaimana disampaikan Drs. Abdullah Gade, bahwa keberhasilan Kota Langsa dalam bidang pendidikan, telah dibuktikan dengan berhasilnya siswa siswi

⁷⁹Terkait dengan toleransi antara umat beragama, hal tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh pasal 126 ayat 2. Pada pasal dan ayat tersebut ditegaskan bahwa setiap orang yang bertempat tinggal atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan syari'at Islam. Pada pasal 127 ayat 2 juga ditegaskan bahwa Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Lihat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Banda Aceh, Biro Hukum dan Humas Setda NAD, 2006), h. 126.

⁸⁰Salah satu ciri penting dari masyarakat madani adalah kemampuan masyarakatnya untuk mempertahankan integrasi pada suatu lingkungan sosial yang pluralistik.

Kota Langsa meraih piala pendidikan dari Gubernur NAD tahun 2005/2006 dan 2006/2007.⁸¹

Berdasarkan data yang diperoleh dari statistik Kota Langsa, terdapat sejumlah lembaga pendidikan yang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Langsa. Lembaga pendidikan tersebut terdiri dari lembaga pendidikan swasta dan negeri, mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi.

Dari data statistik yang diperoleh, jumlah sekolah SD di Kota Langsa adalah sebanyak 62 (Negeri 58 dan Swasta 4), Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 8 (Negeri 5 dan Swastas 3). Kemudian SMP sebanyak 16 (Negeri 13 dan Swasta 3), Madrasah Tsanawiyah sebanyak 8 (Negeri 1 dan Swasta 7). Sedangkan SMA/SKM sederajat sebanyak 17 (Negeri 10 dan Swasta 7) dan Madrasah Aliyah sebanyak 6 (Negeri 2 dan Swasta 4). Di samping itu terdapat juga perguruan tinggi sebanyak 9, terdiri dari sekolah tinggi sebanyak 4, universitas 1, D3 sebanyak 4.⁸²

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah Kota Langsa memiliki keinginan yang kuat untuk menjadikan Langsa sebagai masyarakat madani. Perhatian pemerintah dalam mewujudkan Kota Langsa sebagai kota yang berperadaban atau dengan kata lain masyarakat madani dapat dilihat dari rumusan visi misi pembentukan Kota Langsa. Sebagaimana dijelaskan Wakil Walikota Langsa, bahwa masyarakat madani yang dicita-citakan sesuai dengan visi misi pembentukan Kota Langsa. Visi misi Kota Langsa sebagaimana disampaikan Wakil Walikota Langsa adalah sebagai perwujudan dari kuatnya keinginan pemerintah

⁸¹Drs. Abdullah Gade, Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa, hasil wawancara tanggal 10 Juni 2010 pukul 14.00 WIB di kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Langsa.

⁸²Badan Pusat Statistik dan Bappeda Kota Langsa, Langsa Alam Angka 2010, h.55.

untuk menjadikan Kota Langsa sebagai kota yang berperadaban, terutama setelah penandatanganan MOU damai antara RI-GAM di Helsinki.⁸³

Adapun visi Kota Langsa, sebagaimana yang tertuang pada Langsa Dalam Angka 2010. yaitu terwujudnya masyarakat yang aman, damai, bermartabat, maju, sejahtera dan Islami. Sedangkan misinya secara umum adalah; pertama, menjalankan syariat Islam sesuai dengan status yang disandang oleh propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kedua, mewujudkan pelaksanaan pendidikan yang murah, maju dan berkualitas dan bernuansa Islami. Ketiga, meningkatkan ekonomi masyarakat terutama yang menyangkut ekonomi rakyat. Keempat, meningkatkan sektor pertanian. Kelima, meningkatkan pelayanan administrasi, baik dalam bidang kesehatan maupun bagi pelayanan publik. Keenam, meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan dan telekomunikasi.

Berdasarkan visi misi yang diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pemerintah Kota Langsa mengedepankan nilai-nilai agama sebagai sumber nilai yang mutlak dan universal dalam membangun Kota Langsa. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan Komaruddin Hidayat bahwa dalam masyarakat madani, agama di samping sebagai sebuah keyakinan, ia juga menjadi sumber nilai. Agama menjadi kekuatan bagi konstruk budaya dan perubahan yang pada gilirannya akan membentuk tatanan masyarakat beradab (madani).⁸⁴

Nuansa masyarakat madani itulah yang yang tercermin dari visi misi pembentukan Kota Langsa. Jika kemudian dirinci lebih detail, cita-cita itu terdiri dari

⁸³Saifuddin Razali, Wakil Walikota Langsa, hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 3 Juni 2010 pukul 10.30 WIB di kantor Wakil Walikota Langsa.

⁸⁴Komaruddin Hidayat, *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernitas* (Paramadina, Jakarta: 1998), h. 9.

keinginan untuk mewujudkan masyarakat Kota Langsa yang aman dan damai, maju dan bermartabat, adil, sejahtera dan demokratis.

a. Aman dan Damai

Sebagaimana dipahami bahwa sepanjang Pemerintahan Orde Baru, Aceh telah menjadi daerah yang terus bergolak dengan konflik horizontal. Akibatnya, sepanjang konflik itu juga dapat dikatakan bahwa peranan masyarakat dalam berbagai hal kurang dapat berkembang secara maksimal karena faktor situasi keamanan yang tidak menentu. Dominasi pemerintah Orde Baru selama lebih kurang 30 tahun, ditambah lagi dengan penegasan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) secara tidak sengaja telah menumpulkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Akibat dari itu semua, Aceh sebagai salah satu propinsi terkaya, menjadi terbelakang dalam pelayanan publik, bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian dan dan pembangunan.

Dalam kaitan itu, suasana aman dan damai menjadi dambaan seluruh masyarakat Aceh, termasuk masyarakat Kota Langsa, sehingga perjanjian damai antara RI dan GAM di Helsinki merupakan impian yang sudah lama didambakan masyarakat. Maka dalam mempertahankan kondisi aman dan damai tersebut, pemerintah Kota Langsa bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, terutama dengan para ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat dan *tuha peut* terus melakukan komunikasi yang intensif kepada masyarakat.

Dalam menjaga keamanan dan kedamaian tersebut, Pemerintah Kota Langsa juga berupaya menegakkan supremasi hukum. Sebab, praktik diskriminasi dapat memicu tumbuhnya konflik horizontal yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai

perdamaian yang ada. Sebagaimana dijelaskan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kota Langsa, bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani yang dicita-citakan, Bagian Hukum Kota Langsa terus-menerus meningkatkan kesadaran hukum dengan mensosialisasikan produk hukum yang telah ditetapkan. Bagian hukum melakukan pembinaan dan melestarikan kaedah-kaedah hukum, dan berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia aparatur penegak hukum.⁸⁵

Keinginan kuat pemerintah Kota Langsa dalam penegakan hukum tersebut dapat dilihat dari banyaknya jumlah *qanun* (undang-undang) yang disahkan pemerintah melalui DPRK Langsa. Sejak tahun 2003 sampai tahun 2008, DPRK Langsa telah mengeluarkan 93 *qanun*, baik yang sifatnya *qanun* baru, maupun perubahan atas *qanun* sebelumnya.⁸⁶

Menurut analisis penulis, pemerintah Kota Langsa melakukan hal ini adalah dalam rangka percepatan penegakan hukum dan pemerataan akses informasi bagi masyarakat. Karena yang terjadi selama ini, terlihat bahwa undang-undang lebih banyak berpihak pada kepentingan pemerintah. Bukan pada kepentingan masyarakat. Di samping itu, pemerintah masih lebih mendominasi proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan aset yang dimiliki daerah. Pada kenyataannya, masyarakat hanya lebih sering dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi bagi pemerintah. Hal inilah yang ingin dipecahkan oleh pemerintah Kota Langsa melalui penetapan undang-undang yang disahkan oleh DPRK Langsa.

⁸⁵Alfian SH, Kepala Bagian Hukum Kota Langsa, hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 pukul 14.00 WIB di kantor Sekretariat Pemko Langsa Bagian Hukum.

⁸⁶Qanun Kota Langsa tahun 2010.

Di samping adanya keinginan pemerintah untuk membuat regulasi yang dapat berpihak pada masyarakat, pemerintah Kota Langsa juga terus berusaha meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dan penegak hukum. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, bertanggung jawab, serta profesional, sehingga terlaksana pelayanan publik yang baik. Apa yang dilakukan pemerintah Kota Langsa, tentu saja merupakan upaya untuk mencapai masyarakat madani. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Langsa juga terus berupaya menegakkan hukum secara adil, yakni jika bersalah diberikan sanksi sesuai dengan jenis kesalahannya. Adapun sebagai contoh penegakan hukum yang telah diambil oleh pemerintah Kota Langsa adalah dengan melakukan hukuman cambuk di lapangan Merdeka tahun 2008 terhadap masyarakat yang melanggar Qanun Aceh nomor 3 Tahun 2005, sedangkan di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa Tahun 2010 terhadap masyarakat yang melanggar qanun yang sama dan hal ini dipersaksikan kepada seluruh khalayak masyarakat yang ada di Kota Langsa.

Penciptaan suasana kehidupan dan lingkungan yang damai dan kondusif juga dilakukan pemerintah Kota Langsa dengan memantapkan sistem keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga mampu menangkal ancaman dari luar. Langkah yang dilakukan adalah dengan membangun sistem keamanan lingkungan (siskamling). Hampir disetiap lorong bisa dilihat berdiri siskamling. Setiap malam masyarakat bergantian jaga malam di pos kamling yang ada pada setiap desa.

b. Egaliter

Egaliter yang dimaksud adalah memperlakukan manusia karena kemanusiaannya, tidak karena sebab yang lain di luar itu, seperti ras, kasta, warna kulit, kedudukan, kekayaan atau bahkan agama. Dalam kaitan ini, masyarakat madani yang berdaya guna tidak hanya akan terbangun dalam masyarakat yang aman, damai, berkualitas dan beradab. Masyarakat madani akan terwujud jika sikap egaliter dimiliki seluruh masyarakat.

Dalam mewujudkan sikap egaliter tersebutlah pemerintah Kota Langsa terus melakukan komunikasi yang intensif, dengan memberikan pemahaman bahwa setiap warga memiliki hak azasi yang perlu dihargai secara bersama-sama. Oleh sebab itu, egaliterianisme masyarakat Kota Langsa dapat menjadikan masyarakatnya hidup harmonis secara berdampingan, meskipun dalam dalam masyarakat terdapat perbedaan, baik dari sisi agama, suku dan stratifikasi sosial. Di tengah-tengah kemajemukan tersebut, masyarakat hidup saling menghargai, saling membantu tanpa melihat perbedaan agama dan masyarakat mampu mengatasi konflik tanpa menimbulkan ekses baru.

c. Adil dan Demokratis

Terwujudnya suasana kehidupan politik yang semakin demokratis, aspiratif, akomodatif, dan toleransi dengan tetap berada dalam koridor hukum dan nilai-nilai budaya masyarakat merupakan salah satu ciri masyarakat madani. Sebagaimana dijelaskan Madjid, bahwa sifat adil erat dengan sikap menjaga keseimbangan dan menengahi dalam semangat moderasi dan toleransi. Dalam masyarakat majemuk (plural), sikap adil atau pertengahan merupakan alternatif penyelesaian problema kemasyarakatan. Dengan pandangan demikian kata Madjid, maka makhluk sosial

yang beriman tidaklah mungkin mendukung sistem tirani, sebab setiap tirani bertentangan dengan pandangan hidup yang hanya memutlakkan Tuhan Yang Maha Esa. Sikap terbuka kepada sesama manusia, dengan kedalaman jiwa saling menghargai, tetapi tidak terlepas dari sikap kritis, adalah indikasi adanya petunjuk dari Tuhan.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat madani di Kota Langsa, pemerintah Kota Langsa terus membangun suasana perpolitikan yang demokratis melalui pemantapan dan peningkatan kualitas hubungan dengan lembaga eksekutif, kelembagaan partai dan ormas Islam. Pembangunan politik yang demokratis dilakukan pemerintah melalui proses penanaman nilai-nilai demokratis dengan menciptakan kesadaran dalam menghormati kesamaan hak dalam memperoleh informasi, persamaan dalam memperoleh layanan publik, anti diskriminasi dan mewujudkan wacana dialogis bagi seluruh komponen, sehingga tidak terjadi kemacetan informasi dan komunikasi di tengah-tengah masyarakat.

Konsep inilah yang kemudian disebut Madjid sebagai pengaturan tatanan kehidupan atas dasar kemanusiaan yang sering diterjemahkannya sebagai kehendak bersama bahkan suatu kontrak sosial. Segala hal yang menyangkut persoalan sesama manusia, diselesaikan melalui musyawarah (jalan kompromi) dan gotong royong. Untuk mendukung masyarakat musyawarah dan gotong royong tersebut, perlu dibangun sistem keterbukaan (inklusifitas) di tengah-tengah masyarakat, sehingga hilang sikap saling mencurigai.⁸⁷

⁸⁷*Ibid.*, h. 118-119.

Apa yang dikemukakan Madjid, masih berlaku pada masyarakat Kota Langsa. Di berbagai *gampong* (desa) musyawarah masih menjadi tradisi masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Musyawarah tersebut ada yang dilakukan di *meunasah* (mushallah), di masjid maupun di balai-balai pertemuan masyarakat. Dalam suasana musyawarah yang terbuka, setiap anggota masyarakat bebas menyampaikan aspirasinya, sepanjang tidak keluar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Inilah salah satu yang menarik dari prosesi musyawarah yang terjadi pada masyarakat Kota Langsa. Meskipun kebebasan dibuka seluas-luasnya, tetapi kebebasan itu tidak lepas dari nilai-nilai, norma ataupun budaya kemasyarakatan. Demikian juga dengan kegiatan gotong royong, masih menjadi tradisi yang melekat dengan kehidupan masyarakat Kota Langsa. Prinsip ini menggambarkan kuatnya peletakkan dasar-dasar hubungan dalam masyarakat Kota Langsa yang benar-benar demokratis.

B. Teknik Komunikasi Pemerintah Dalam Membangun Masyarakat Madani di Kota Langsa

Salah satu penentu yang paling kritis dalam proses komunikasi adalah terletak pada teknik yang digunakan. Dari pengamatan yang dilakukan, teknik komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dapat dikategorikan kepada dua macam teknik, yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia.

1. Komunikasi Tatap Muka

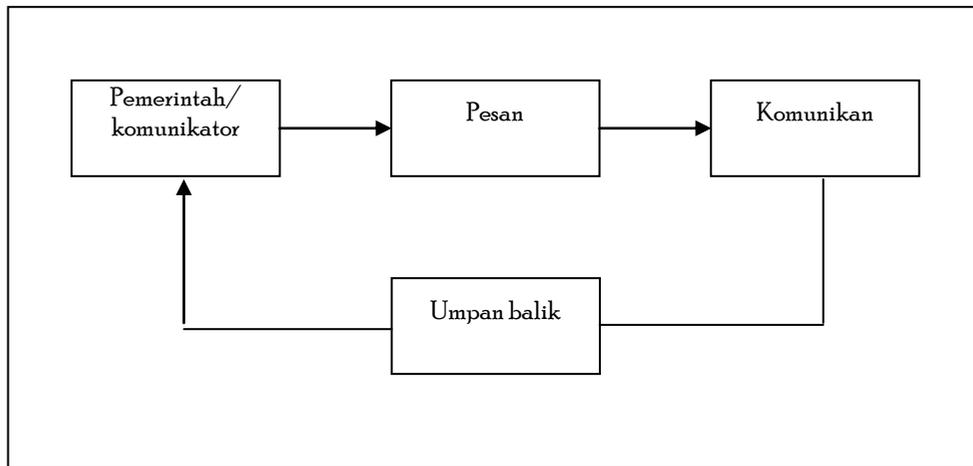
Komunikasi tatap muka (*face to face*) adalah komunikasi yang berlangsung di mana antara komunikator dengan komunikan berhadap-hadapan. Dalam hal ini, pemerintah sebagai komunikator sedangkan komunikannya adalah masyarakat.

Dalam kajian komunikasi, proses komunikasi ini disebut juga sebagai komunikasi primer. Komunikasi model ini sering digunakan dalam rangka melakukan perubahan pada tingkah laku (*behaviour change*) dari masyarakat. Karena sewaktu berkomunikasi, terjadi umpan balik atau dialog langsung karena antara komunikator dengan komunikan dapat saling melihat dan berhadap-hadapan. Kondisi seperti ini lebih memungkinkan bagi orang-orang yang terlibat komunikasi untuk saling mengetahui situasi dan kondisi masing-masing.

Dari pengamatan yang dilakukan, komunikasi primer atau tatap muka ini banyak dilakukan pemerintah dengan melibatkan masyarakat secara langsung, misalnya seperti dialog tanya jawab. Komunikasi tatap muka dilakukan pemerintah dengan dua cara, yaitu komunikasi antarpersona dan komunikasi kelompok. Namun yang paling lazim dilakukan adalah komunikasi kelompok, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok besar.

Pada komunikasi kelompok kecil, terlihat bahwa jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses komunikasi tersebut relatif sedikit. Pemerintah Kota Langsa menjadi komunikator dan masyarakat sebagai komunikan. Komunikator yang terlibat dalam hal ini adalah para pejabat yang berkompeten, seperti para pimpinan Muspida dan Muspika, sedangkan dari masyarakat adalah kepala desa (*geuchik*), para pengetua adat dan para *tuah peut*. Para pemuka masyarakat yang telah disebutkan menjadi ujung tombak dalam rangka mensosialisasikan upaya pencapaian cita-cita Kota Langsa sebagai masyarakat madani. Proses komunikasi pemerintah pada komunikasi kelompok kecil ini dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini.

Gambar 4.2. Proses komunikasi kelompok antara pemerintah Kota Langsa dengan masyarakat pada kelompok kecil.



Berdasarkan bagan di atas menunjukkan bahwa komunikasi diawali dari pesan yang disampaikan sumber (komunikator) kepada komunikan yang pada akhirnya terjadilah umpan balik terhadap pernyataan pesan itu sendiri.

Hal yang sama tentunya juga terjadi pada masyarakat Kota Langsa, dimana Pemerintah menyampaikan pesan-pesan pembangunannya kepada masyarakat yang berorientasi pada visi misi Kota Langsa sudah barang tentu terjadinya umpan balik antara masyarakat sebagai penerima pesan dengan pemerintah Kota Langsa yang menyampaikan pesan. Kemudian pesan tersebut disampaikan melalui saluran tatap muka (*face to face*) kepada masyarakat. Tahapan terakhir dari proses tersebut adalah umpan balik atau tanggapan langsung dari masyarakat (komunikan) kepada pemerintah (komunikator) terkait dengan hal-hal yang disampaikan.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, komunikasi pemerintah pada kelompok kecil ini memiliki beberapa keunggulan. Pertama, komunikasi kelompok yang dilakukan pemerintah bersifat formal, lebih terorganisir, dan lebih terlembaga.

Hal ini disebabkan karena masyarakat yang diajak berdialog pada kelompok kecil itu umumnya adalah kepala desa, tokoh agama dan para *tuha peut*, sehingga program pembangunan yang akan dilaksanakan lebih mudah tersosialisasi. Di samping mereka mudah dalam memahami visi dan misi pembangunan yang diprogramkan, para kepala desa dan *tuha peut* juga secara langsung terlibat pada proses penentuan suksesnya program pembangunan yang dibicarakan, karena mereka adalah pejabat negara.

Kedua, komunikasi pada kelompok kecil ini dapat dikatakan unggul, karena jumlahnya yang relatif sedikit lebih dapat memberikan peluang bagi semua orang, untuk dapat berkomunikasi dengan mudah, baik ia sebagai pengirim maupun penerima pesan. Pada kelompok kecil ini, terlihat hubungan emosional yang kuat antara semua orang yang terlibat di dalamnya. Pada komunikasi kelompok kecil ini, terlihat adanya pertukaran informasi yang sifatnya bersambung dari satu orang kepada orang lain. Konkritnya, yang kecenderungan yang berlaku pada komunikasi kelompok kecil ini adalah komunikasi persuasif dan komunikasi yang manusiawi. Di dalamnya terlihat tidak ada pemaksaan, melainkan komunikasi yang dilakukan secara pendekatan pribadi. Masing-masing yang terlibat dalam komunikasi dapat saling bercurah pendapat tanpa merasa tertekan.

Ketiga, dapat diperhatikan bahwa dalam komunikasi kelompok, antara yang satu dengan yang lain dapat saling mempengaruhi. Ini terjadi, karena dalam komunikasi kelompok terjadi konformitas. Bila sejumlah orang dalam kelompok mengatakan atau melakukan sesuatu, ada kecenderungan yang lain juga akan

melakukan hal yang sama. Kemudian, saling mempengaruhi dalam membangkitkan semangat untuk melakukan perubahan.

Uraian di atas menguatkan argumentasi yang disampaikan Michael Burgoon, bahwa dalam komunikasi kelompok yang dilakukan secara tatap muka, interaksi antara orang-orang yang berkomunikasi akan lebih tinggi interaksinya dari pada komunikasi interpersonal. Hal itu disebabkan karena masing-masing sudah mengetahui tujuan yang akan dibicarakan, memiliki susunan rencana kerja untuk tercapainya tujuan kelompok dan mengetahui problem yang dihadapi serta solusi pemecahan masalah yang muncul.⁸⁸

Pada proses komunikasi kelompok besar, pemerintah Kota Langsa melakukan komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Perbedaannya dengan kelompok kecil ialah, bahwa komunikasi pada kelompok besar ini pemerintah Kota Langsa berhadapan dengan massa yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, seperti yang dilakukan di lapangan merdeka Kota Langsa. Sifat komunikasi ini lebih cenderung satu arah, karena tidak memungkinkan untuk melakukan kontak pribadi atau dialog secara bebas dengan pemerintah sebagai komunikator. Tetapi proses komunikasi seperti ini sangat jarang dilakukan pemerintah Kota Langsa. Kecenderungan yang terjadi selama ini adalah berkomunikasi melalui kelompok kecil.

Komunikasi pemerintah melalui kelompok besar ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu: Pertama, jumlah massa yang menjadi sasaran penyampaian pesan jauh lebih banyak dan waktu yang digunakan pemerintah relatif lebih sedikit. Kedua,

⁸⁸Wiryanto, *Komunikasi*, h. 23.

pesan yang disampaikan pemerintah bersifat serentak dan disampaikan kepada masyarakat yang heterogen. Artinya, bahwa yang menjadi sasaran komunikasi terdiri dari masyarakat yang berbeda dari sisi usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan sebagainya.

Dari pengamatan yang dilakukan terhadap kedua proses komunikasi ini, terdapat sejumlah kelemahan, disamping keunggulan yang telah dijelaskan di atas. Kelemahan yang dimaksud yaitu, pada komunikasi kelompok kecil, pemerintah Kota Langsa lebih sering melibatkan kepala desa dan *tuha peut* serta kelompok-kelompok organisasi masyarakat sipil yang berbadan hukum formal. Hal ini menyebabkan, organisasi atau kelompok masyarakat yang tidak berbadan hukum, seperti kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok perwira dan sebagainya, lebih sering tidak ikut terlibat dalam membicarakan pembangunan. Padahal, peran mereka sebagai organisasi sosial, juga memiliki andil yang cukup penting bagi percepatan pembangunan di Kota Langsa. Sedangkan kelemahan komunikasi pada kelompok besar ialah, bahwa komunikasi pemerintah cenderung bersifat linear atau satu arah, sehingga tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk berdialog dengan pemerintah.

2. Komunikasi Bermedia

Teknik komunikasi lainnya yang digunakan pemerintah Kota Langsa untuk mewujudkan masyarakat madani adalah dengan menggunakan media komunikasi informasi yang tersedia. Komunikasi bermedia (*public media and mass media*) merupakan komunikasi yang berlangsung di mana pemerintah sebagai komunikator menggunakan media yang ada untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Komunikasi ini disebut juga sebagai komunikasi skunder atau komunikasi tidak

langsung, karena pemerintah menggunakan perantara untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Pada umumnya, komunikasi ini bersifat informatif, dan instruktif sehingga tidak begitu ampuh untuk mengubah tingkah laku.

Dari pengamatan yang dilakukan, media yang biasa digunakan pemerintah Kota Langsa dalam proses komunikasi ini adalah media massa, seperti surat kabar dan radio. Dalam kajian komunikasi, proses ini disebut juga dengan komunikasi massa, karena menggunakan media massa sebagai saluran utama dalam menyampaikan pesan kepada masyarakat. Komunikasi massa ini dilakukan karena khalayak yang dituju atau sasaran komunikasinya sangat luas.

Di samping media massa, pemerintah Kota Langsa juga menggunakan media nirmassa seperti papan pengumuman, poster, spanduk dan baleho. Pesan-pesan pembangunan ditempelkan di papan-papan pengumuman. Kemudian, media tradisional juga menjadi media utama dalam proses penyampaian pesan pembangunan kepada masyarakat.

Media massa yang digunakan pemerintah Kota Langsa adalah seperti surat kabar, baik harian maupun mingguan. Surat kabar yang digunakan adalah Harian Serambi, Prohaba, Metro Aceh, Harian Waspada dan Harian Analisa. Sedangkan radio yang digunakan adalah radio Cempala Kuneng milik Pemerintah Daerah Aceh Timur yang masih berstasiun di Kota Langsa sampai sekarang. Kecenderungan komunikasi ini adalah bersifat informatif, karena yang disampaikan melalui media tersebut adalah berupa informasi-informasi pembangunan.

Pemerintah Kota Langsa juga memanfaatkan jasa kehumasan pada setiap lembaga. Karena dipahami bahwa lembaga humas dikenal sebagai ujung tombak

komunikasi pemerintah kepada masyarakat. Tetapi realitas di lapangan menunjukkan bahwa penyebaran informasi melalui kehumasan di lingkungan pemerintah Kota Langsa belum berjalan secara maksimal. Informasi yang disampaikan masih cenderung sepihak, yaitu bersifat *top down*. Informasi yang disampaikan lebih banyak tentang keberhasilan pemerintah, sedangkan masalah yang dihadapi masyarakat sangat jarang diberitakan. Padahal, kehumasan merupakan jembatan emasnya informasi dari pemerintah ke masyarakat dan sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah.

Artinya dalam hal ini, kehumasan harus berdiri pada posisi yang netral, sehingga arus informasi tersebut menjadi seimbang. Oleh karena itu, mengingat dinamika komunikasi yang terus berkembang, jajaran humas harus lebih menguasai teknik-teknik komunikasi yang efektif dan mampu memperluas jaringan dengan media massa. Salah satu strategi yang harus dikuasai oleh jajaran humas, adalah bagaimana mengembangkan tekni propaganda dan antisipasi dalam pemberitaan. Propaganda yang dimaksudkan bukan berkonotasi negatif. Tapi sebuah langkah preventif untuk mengatasi isu-isu negatif yang dikembangkan pihak-pihak tidak bertanggung jawab terhadap tugas-tugas pemerintahan. Dengan menguasai teknik komunikasi, maka pemerintah melalui kehumasan akan mampu menjadikan informasi lebih berimbang.

Para pakar berpendapat bahwa teknik-teknik komunikasi skunder, seperti menggunakan media, kehumasan dan sebagainya, semakin lama akan semakin efektif karena didukung oleh teknologi yang semakin canggih. Pendapat ini sesuai dengan fakta yang diperoleh penulis dari lapangan. Bahwa penggunaan media massa,

seperti surat kabar terlihat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat Kota Langsa.

Selain surat kabar pemerintah Kota Langsa menggunakan media lain, yaitu media nirmassa. Bentuk media nirmassa yang digunakan pemerintah adalah berupa papan pengumuman yang ada ditempat-tempat pelayanan umum, seperti kantor kepala desa, masjid-masjid dan pos kamling. Pesan-pesan tentang pencapaian cita-cita masyarakat madani, seperti yang tercantum pada visi misi Kota Langsa, disampaikan kepada masyarakat melalui himbauan-himbauan yang ditempelkan pada papan pengumuman. Kemudian pemerintah Kota Langsa juga menggunakan poster dan baliho. Isi dari baliho tersebut adalah pesan-pesan yang mengajak masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Kota Langsa, misalnya dalam membangun suasana yang aman dan damai.

Dari pengamatan yang dilakukan, sampai saat ini terdapat himbauan yang mengajak masyarakat untuk menjaga keamanan dan perdamaian. Seperti pesan yang terpampang besar pada baliho di depan lapangan merdeka Langsa. Baliho tersebut berisi “Damai Aceh dalam NKRI sudah final”. Ini merupakan sosialisasi pemerintah kepada masyarakat, sehingga kesadaran masyarakat tumbuh untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab untuk menjaga perdamaian yang telah diperoleh. Selain itu, terdapat juga spanduk-spanduk yang berisi himbauan agar masyarakat berpartisipasi dalam mewujudkan Kota Langsa sebagai masyarakat madani. Isi spanduk tersebut antara lain adalah “Mari wujudkan Kota Langsa sebagai kota yang aman, damai dan sejahtera”.

Selain kedua media yang telah disebutkan di atas, pemerintah Kota Langsa juga menggunakan media tradisional sebagai media utama dalam meningkatkan terwujudnya pembangunan masyarakat madani di kota Langsa. Media tradisional yang digunakan adalah kesenian daerah yang tetap hidup di tengah-tengah masyarakat. Di antara media tradisional yang dimaksud adalah tari seudati, tari saman dan tari laweut. Semua tari-tarian tersebut mengandung nilai-nilai yang dapat memberikan dorongan kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan dalam segala aspek kehidupan.

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan pemerintah Kota Langsa dalam memanfaatkan saluran komunikasi, baik komunikasi tatap muka maupun komunikasi bermedia, sangat tergantung pada kesesuaian teknik dan strategi yang tepat dengan kondisi masyarakat. Sebagaimana dikatakan Effendi, bahwa strategi komunikasi merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.⁸⁹

Dalam kaitan itu, proses pencapaian komunikasi yang efektif, yaitu komunikasi yang berpengaruh terhadap kognitif, afektif, dan konasi masyarakat, sangat tergantung pada pemahaman terhadap strategi dan teknik komunikasi yang digunakan.⁹⁰ Untuk itu, perlu adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memadai, terutama yang berkaitan dengan tenaga profesional komunikator

⁸⁹Effendi, *Dinamika*, h. 32.

⁹⁰Efek kognitif yang dimaksud adalah terkait dengan pikiran nalar atau rasio, misalnya masyarakat yang semula tidak tahu, tidak mengerti atau tidak sadar, menjadi tahu, mengerti dan sadar. Efek afektif adalah efek yang berkaitan dengan perasaan, misalnya masyarakat yang semula merasa tidak senang atau antipati, mejadi senang atau simpati. Efek konatif yang dimaksud adalah berkaitan dengan timbulnya keyakinan dalam diri komunikan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendaki pemerintah berdasarkan pesan yang ditansmisikan.

pembangunan di Kota Langsa. Karena dalam kajian strategi komunikasi, kemampuan komunikator merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan komunikasi. Sebab itu, pemerintah sebagai komunikator diharapkan mampu menumbuhkan daya tarik dan membangkitkan perhatian masyarakat, sehingga sikap, opini dan perilaku masyarakat dapat berubah ke arah yang lebih dinamis.

C. Media Yang digunakan Pemerintah Dalam Menyampaikan Pesan-Pesan Pembangunan

Proses pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar apabila tidak didukung oleh media. Melalui media, masyarakat dapat menggali informasi pembangunan. Melalui media, informasi pembangunan semakin cepat tersosialisasi. Oleh sebab itu, media dapat dikatakan memiliki peran yang sangat penting dalam proses penyebaran informasi pembangunan. Dengan demikian, agar pesan-pesan pembangunan dapat lebih merata kepada seluruh lapisan masyarakat, perlu digunakan media komunikasi yang tepat dan bersifat dekat dengan masyarakat.

Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat madani di Kota Langsa, banyak media yang dapat dijadikan sebagai sarana penyebaran informasi. Namun demikian, tidak semua media sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama bagi masyarakat pedesaan. Bila diperhatikan, media yang digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Langsa dapat dikategorikan kepada dua macam, yaitu media modern dan media tradisional.

1. Media Modern

Media modern adalah media yang berkembang seiring dengan perkembangan teknologi modern. Contoh media modern adalah surat kabar, majalah, televisi, film, radio dan internet. Media ini sering dinilai lebih unggul dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, karena lebih cepat dan memiliki kemampuan menaklukkan ruang dan waktu. Akan tetapi media jenis ini tidak bisa diterapkan secara efektif di kalangan masyarakat pedesaan karena terkendala dengan aksesibilitas.

Maksud terkendala dengan aksesibilitas ialah kemampuan masyarakat yang sangat rendah untuk berlangganan surat kabar dan majalah. Demikian juga dengan televisi, kendalanya ialah pemerintah Kota Langsa tidak memiliki stasiun televisi sendiri. Sedangkan untuk mengharapkan TVRI Banda Aceh sangat tidak mungkin, karena TVRI Banda Aceh belum mampu menjangkau Kota Langsa. Sementara media baru, yakni media online seperti internet, terkendala pada konektivitas. Di samping biaya aksesnya relatif mahal, ketersediaan infrastruktur pendukung di desa-desa juga belum memadai sepenuhnya.

Menurut pengamatan yang dilakukan, dari media-media modern yang ada di Kota Langsa, maka media modern yang paling efektif digunakan adalah surat kabar dan radio. Penggunaan surat kabar dikatakan efektif ialah karena masyarakat Kota Langsa sangat suka minum kopi di kedai-kedai kopi, sementara dari pengamatan yang dilakukan, hampir seluruh kedai kopi berlangganan surat kabar. Masyarakat Kota Langsa, meskipun tidak berlangganan surat kabar, tapi mereka dimungkinkan membaca surat kabar pada saat duduk di kedai kopi. Seperti yang disampaikan Mukhlis kepada penulis pada saat diwawancarai di warung kopi Damai, bahwa

meskipun ia tidak berlangganan surat kabar, tetapi ia selalu membaca surat kabar. Hal itu ia lakukan pada saat duduk di warung kopi sambil minum kopi.⁹¹

Adapun surat kabar yang ada di warung kopi seperti Harian Serambi Indonesia, Harian Rakyat Aceh, Harian Pro Haba, Mingguan Citra Aceh, Mingguan Aceh pos, dan tidak ketinggalan pula surat kabar luar daerah seperti harian Waspada, yang banyak dibaca oleh masyarakat Kota Langsa.

Media modern yang juga sangat efektif digunakan dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat Kota Langsa adalah radio. Jika surat kabar lebih cenderung digunakan oleh masyarakat yang tinggal di pusat kota, atau masyarakat yang suka ke kedai kopi, maka siaran radio dapat menjangkau sasaran yang lebih luas. Tidak hanya masyarakat yang berada di pusat kota, tetapi masyarakat desa juga dapat mengaksesnya. Persoalannya kemudian, radio yang ada di Kota Langsa baru satu stasiun, yaitu radio Cempala Kuneng dan radio tersebutpun merupakan milik Pemerintah Aceh Timur. Namun demikian, radio ini juga sering digunakan pemerintah Kota Langsa sebagai media untuk menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat Kota Langsa.

Berdasarkan observasi yang dilakukan, di antara sebagian masyarakat Kota Langsa sering juga mendengarkan siaran radio Cempala Kuneng. Ada yang mendengarkannya melalui HP dan ada juga yang memiliki radio sendiri. Misalnya seperti pengakuan yang disampaikan Ismail, bahwa ia sering mendengarkan siaran radio Cempala Kuneng setelah pulang dari laut. Sambil santai di waktu sore, ia mendengarkan siaran radio. Siaran yang di dengarkan adalah lagu-lagu Aceh dan ada

⁹¹Mukhlis, seorang penduduk desa (*gampong*) Sidodadi yang bekerja setiap hari sebagai karyawan toko di pekan Langsa. Wawancara dilakukan tanggal 6 Desember 2010 di gampong Sidodadi Kota Langsa.

juga himbauan dari pemerintah, seperti ajakan untuk membuang sampah, membayar zakat dan sebagainya.⁹²

Dari uraian di atas, maka menurut pengamatan penulis, pembinaan tenaga teknik radio dalam rangka meningkatkan mutu siaran, terutama siaran pembangunan terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan seiring dengan meningkatnya selera masyarakat dalam mendengarkan siaran radio. Bahkan peningkatan siaran tersebut, pemerintah Kota Langsa melakukan kerja sama dengan pemerintah Aceh Timur, pemerintah Kota Langsa mendirikan siaran radio sendiri. Di samping itu, pemerintah Kota Langsa terus melakukan terobosan kepada pemerintah Aceh, untuk tersedianya pemancar televisi di Kota Langsa, sehingga siaran TVRI Banda Aceh dapat dinikmati masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk peningkatan dan perluasan daya jangkau siaran TVRI Banda Aceh itu dapat dinikmati masyarakat Kota Langsa. Disamping itu pemerintah Kota Langsa juga dapat lebih mudah menyampaikan pesan-pesan pembangunan tersebut kepada masyarakat, baik yang berada di pusat kota maupun di desa-desa. Karena dari pengamatan yang dilakukan penulis, hampir setiap rumah tangga yang ada di Kota Langsa menggunakan televisi sebagai sarana mencari informasi.

Menurut para pakar, media-media massa yang telah disebutkan di atas, memiliki kemampuan untuk mempengaruhi khalayak. Hal ini dapat dilihat semakin tingginya minat masyarakat Kota Langsa untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dalam rangka piningkatkan SDMnya untuk dapat mendukung pemerintah

⁹²Ismail, seorang nelayan di Kuala Langsa. Wawancara tanggal 13 Januari 2011, di Kuala Langsa Kota Langsa.

dalam mewujudkan masyarakat madani di Kota Langsa. Sebagaimana teori dependensi yang diperkenalkan Sandra Ball-Rokeach dan Melvin L. Defleur. Teori ini menjelaskan bahwa masyarakat modern sebagai audiens menjadi tergantung pada media massa. Media massa bagi audiens menjadi sumber informasi dalam menambah pengetahuan tentang apa yang terjadi di masyarakat. Teori ini juga menegaskan bahwa media massa memiliki efek kognitif, afektif dan behavioral.⁹³

Pertama, efek kognitif media massa terjadi bila ada perubahan pada apa yang diketahui, difahami, atau dipersepsi khalayak. Efek kognitif berkaitan dengan transmisi pengetahuan, keterampilan, kepercayaan atau informasi. Di sini terlihat fungsi komunikasi massa sebagai mendidik, menginformasikan, dan menghibur.

Kedua, efek afektif timbul bila ada perubahan pada apa yang dirasakan, disenangi atau dibenci khalayak. Efek afektif ada hubungannya dengan emosi, sikap atau nilai. Efek afektif berkaitan juga dengan penciptaan meningkat atau menurunnya dukungan moral terhadap informasi yang disampaikan.

Ketiga, efek behavioral, yaitu merujuk pada perilaku nyata yang dapat diamati, meliputi pola-pola tindakan, kegiatan, atau kebiasaan berperilaku. Termasuk dalam efek behavioral ini adalah keinginan untuk terlibat dalam suatu aktivitas setelah mendengarkan informasi yang disampaikan.

2. Media Tradisional

Penggunaan media tradisional sebagai sarana penyebarluasan informasi telah dilakukan sebelum bangsa ini merdeka. Pada jaman para Wali Songo, media tradisional telah digunakan sebagai sarana untuk penyebaran ajaran-ajaran agama

⁹³Sendjaja, *Teori*, h. 201.

Islam kepada masyarakat di Pulau Jawa. Sementara di Aceh dalam rangka penyampaian pesan-pesan pembangunan disampaikan pula melalui media tradisional seperti lewat *tari seudati*, *rapai daboh* dan *hikayat-hikayat aceh lainnya*. Mereka hanya mengemas bagian-bagian materi yang dianggap sejalan dengan nilai-nilai Islam dan mereduksi muatan-muatan yang dinilai pembangunan.

Pada masa penjajahan Belanda, meskipun ada pembatasan-pembatasan dalam pertunjukkan wayang, tetapi para seniman tetap berupaya mementaskan jenis kesenian ini di tengah-tengah masyarakat pendukungnya. Mereka tidak hanya mementaskannya sebagai hiburan, tetapi berupaya juga melakukan kritik sosial terhadap penjajahan kolonial pada waktu itu. Setelah Indonesia merdeka, media tradisional tetap dipakai sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan.

Pada masyarakat Kota Langsa misalnya, pemerintah tidak hanya menggunakan media modern, seperti media massa dan nirmassa sebagai saluran komunikasi utama, namun Pemerintah Kota Langsa juga menggunakan media tradisional atau yang sering juga disebut sebagai media rakyat.

Sebagaimana disebutkan Astrid S. Susanto, media tradisional mempunyai fungsi meningkatkan dan mengembangkan nilai spiritual, etis, dan estetis pada diri manusia. Di samping itu, dapat juga sebagai media hiburan dan penyebarluasan informasi publik, karena alur cerita dalam kesenian rakyat biasanya disampaikan dengan bahasa lokal dan menyatu dalam kehidupan masyarakat setempat, sehingga mudah dimengerti dan dicerna oleh masyarakat. Media tradisional dengan sendirinya

menggambarkan suatu kehidupan manusia, lengkap dengan keinginan-keinginan, cita-cita dan berbagai masalah yang dihadapi.⁹⁴

Menurut pengamatan yang dilakukan, media rakyat atau media tradisional, merupakan salah satu saluran komunikasi alternatif bagi pemerintah Kota Langsa maupun masyarakat untuk menyalurkan ide, gagasan, aspirasi, inovasi, dan juga kritik yang berhubungan dengan pembangunan. Kehadiran media ini dianggap sebagai alternatif, karena di antara masyarakat ada yang tidak membaca koran dan ada juga yang tidak mendengarkan radio. Agar pesan-pesan pembangunan tetap sampai kepada masyarakat, maka disisipkanlah lewat media-media rakyat.

Sebagai media alternatif, media rakyat biasanya berisikan tentang keteladanan, simbol, ritual, cita-cita budaya, dan menggambarkan nilai baik dan buruk. Pesan-pesan yang terkandung dalam media rakyat tersebut cenderung disampaikan dengan gaya bahasa yang dekat dengan masyarakat. Pada masyarakat Aceh, ragam media tradisional ini berupa tari-tarian, syair-syair pujian, dan kisah-kisah perjuangan rakyat Aceh.

Pada masyarakat Kota Langsa, media rakyat berupa kesenian tradisional terus hidup di tengah masyarakat. Pesan-pesan yang terkandung dalam media tradisional tersebut adalah berupa motivasi bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun daerahnya. Di samping itu, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat membangun hubungan kedekatan antara masyarakat dengan pemerintah, penghargaan identitas diri dan eksistensi budaya.

⁹⁴Astrid S Susanto, *Komunikasi Sosial di Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1985), h. 69.

Di antara tari-tarian yang masih hidup pada masyarakat Kota Langsa dan tetap digunakan pemerintah Kota Langsa sebagai mediasi untuk mengkomunikasikan pembangunan kepada masyarakat adalah tari seudati, tari saman dan tari laweut. Tari seudati misalnya adalah salah satu tari yang sangat digemari oleh sebagian masyarakat Aceh termasuk masyarakat Kota Langsa. Meskipun pada mulanya tarian ini awalnya berkembang di Aceh Utara dan Pidie, tetapi kemudian sudah menjadi tarian utama dalam setiap acara-acara besar dan diterima oleh masyarakat sebagai tarian khas daerah. Misalnya, jika ada acara-acara formal pertemuan antara pemerintah dengan masyarakat, tarian ini sering ditampilkan oleh sekelompok pemuda-pemudi di awal acara tersebut.

Menurut catatan sejarah, tari seudati telah berkembang di Aceh sejak ratusan tahun yang silam dan pada mulanya tidak bernafaskan Islam. Tetapi ketika Islam masuk ke Aceh, maka tarian ini diisi dengan nilai-nilai Islam oleh para ulama-ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai media komunikasi sosial untuk membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Ciri khas tari seudati adalah heroik, gembira dan menggambarkan kebersamaan. Di samping itu tarian *seudati* tidak menggunakan alat musik dan sebagai pengganti para penari membunyikan jari, hentakan kaki, tepukan dada serta syair-syair yang dilantunkan oleh dua orang narator yang disebut *aneuk syahi*. Syair-syair pengiring biasanya bertemakan keagamaan, informasi pembangunan negara dan kebersamaan.

Menurut sejarah, sewaktu perang Aceh, tari seudati digunakan untuk membakar semangat para pemuda untuk berperang melawan penjajah. Dalam konteks kemerdekaan, tari seudati digunakan untuk membangkitkan semangat

masyarakat untuk berpartisipasi dalam mengisi kemerdekaan, menggiatkan semangat membangun dan menjaga semangat ukhuwah Islamiyah.

Tari seudati dimainkan oleh 8 orang yang terdiri dari 1 orang pemimpin yang disebut syekh, 1 orang pembantu syekh, 2 orang pembantu sebelah kiri yang disebut *apeetwie* dan 1 orang pembantu di belakang yang disebut *apeet bak*, serta 3 orang pembantu biasa. Busana tari ini sangat sederhana terdiri dari celana panjang biasa berwarna putih, baju kaos lengan panjang yang ketat dan berwarna putih, kain songket dililit erat disekitar pinggang dan rencong diselipkan di pinggang serta ikat kepala berwarna merah. Tari seudati menggambarkan perjuangan, sikap kepahlawanan, keriang, kelincahan, serta sikap hidup yang dinamis, kegotong royongan dan persatuan.

Selain tari seudati, ada juga namanya tari saman. Tari saman juga merupakan kesenian tradisional yang banyak digunakan pemerintah untuk menyampaikan program pembangunan kepada masyarakat. Tari saman yang awalnya berkembang di gayo kemudian merambah ke Aceh Timur, termasuk Kota Langsa yang merupakan pemekaran Aceh Timur. Tari saman digunakan sebagai media untuk menyampaikan informasi keagamaan dan pembangunan kepada masyarakat umum.

Kemudian ada juga tari laweut, yaitu tari yang pertama kali tumbuh dan berkembang di Pidie, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, tari ini merambah ke seluruh Aceh, termasuk Kota Langsa. Syair-syair tari laweut mengandung pesan-pesan tersendiri seperti mengenai keimanan, kemasyarakatan, pembangunan dan sebagainya. Corak kesenian tersebut tampaknya berasal dari dua budaya yang berasimilasi, yaitu kebudayaan Islam dan nilai-nilai budaya yang berlaku pada masyarakat Aceh.

Berdasarkan fakta di atas, kesenian rakyat yang tumbuh ditengah masyarakat Kota Langsa tetap relevan untuk dijadikan sebagai media untuk menyampaikan informasi pembangunan. Hal ini mengingat masyarakat Kota Langsa sebahagian besar tinggal di pedesaan dan keinginan untuk berlangganan surat kabar sangat rendah.

Oleh sebab itu, Susanto menegaskan bahwa kesenian tradisional dipandang sangat efektif dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan.⁹⁵ Pandam Guritno juga menegaskan, bahwa sangat keliru orang yang menilai, jika kesenian tradisional dipandang sebagai perwujudan dari keterbelakangan dan kekolotan. Kesenian tradisional tetap relevan dijadikan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan pembangunan kepada masyarakat, terutama kepada masyarakat yang masih terikat dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat.⁹⁶

Menurut analisis penulis, media rakyat seperti yang masih hidup pada masyarakat Kota Langsa merupakan hal yang tidak boleh diabaikan dalam penyebaran informasi pembangunan. Hal ini melihat kepada kondisi masyarakat Kota Langsa yang sebahagian besar tinggal di desa. Ketersediaan media komunikasi alternatif ini dapat dengan tepat menyentuh hajat komunikasi masyarakat. Oleh karena itu, media tradisional yang hidup dan berkembang di masyarakat tampaknya tidak dapat diabaikan begitu saja, sekalipun media modern sekarang ini telah berkembang pesat. Hal ini disebabkan karena media tradisional merupakan bagian

⁹⁵*Ibid.*, h. 71.

⁹⁶Pandam Guritno, "Wayang Purwa Sebagai Medium Komunikasi" dalam Eduard Depari dan Colin MacAndrews, *Peranan Komunikasi*, h. 127-129.

yang melakat dalam budaya masyarakat, sehingga sekalipun perkembangan teknologi telah mendorong berkembangnya media modern sebagai saluran komunikasi yang penuh daya (*powerfull*), namun dalam hal-hal tertentu media modern tidak bisa digantikan.

Dalam kaitan itu, maka dalam mewujudkan cita-cita masyarakat madani di Kota Langsa, penyampaian informasi pembangunan melalui media modern dengan media tradisional harus dipergunakan secara terintegrasi. Dengan cara tersebut, kendala aksesibilitas yang muncul pada masyarakat dalam penggunaan media modern dapat tertutup oleh penggunaan media tradisional. Sebaliknya, sifat media tradisional yang dinilai lambat, dapat ditutup media modern yang lebih unggul dan cepat.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis, terlihat bahwa pemerintah Kota Langsa dihadapkan pada tantangan yang cukup berat, terutama dalam menggunakan media tradisional ini sebagai media komunikasi pembangunan. Persoalannya, dalam menggunakan media tradisional ini, satu sisi ia bisa hanya sekedar hiburan saja, tetapi pada sisi lain ia bisa menjadi mediasi dalam penyampaian pesan pembangunan. Di sinilah dibutuhkan kearifan pemerintah dalam menyikapinya, di samping masyarakat juga harus turut berkontribusi sehingga media tradisional tidak hanya sebagai objek hiburan, tetapi sekaligus sebagai media informasi bagi penyampaian isu-isu kontemporer, seperti pembangunan, pengentasan kemiskinan, peningkatan etos kerja dan sebagainya. Oleh karena itu, tantangan ke depan yang dihadapi pemerintah Kota Langsa adalah bagaimana menumbuh kembangkan media

tradisional agar bisa menjadi tontonan yang bisa dinikmati dan diterima oleh masyarakat dalam jumlah lebih besar dan dalam wilayah teritorial yang lebih luas. Inovasi dalam hal ini bisa dilakukan, sepanjang tidak mendekonstruksi wujud dan karakter asli dari kesenian tradisional dimaksud.

D. Hasil Komunikasi Yang Dilakukan Pemerintah

Pembangunan merupakan proses yang bersifat berkesinambungan dan terencana. Tujuannya adalah untuk merubah dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik. Dalam konteks keindonesiaan, pembangunan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945. Apa yang menjadi amanat UUD 1945, juga merupakan amanat dari konsep ideal masyarakat madani yang pernah digambarkan Nabi di Madinah, yaitu masyarakat yang adil, makmur, aman dan damai di bawah keteraturan piagam Madinah.

Bila dikaitkan dengan masyarakat Kota Langsa, maka tujuan pembangunan yang dicapai adalah membangun masyarakat madani, atau masyarakat berperadaban sesuai dengan visi misi Kota Langsa. Namun dari pengamatan yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa cita-cita itu relatif belum menampakkan hasil yang maksimal. Argumentasi ini didasarkan pada hasil observasi dan data yang diperoleh dari lapangan. Jika masyarakat madani yang digambarkan Nabi adalah masyarakat yang adil dan sejahtera, maka hal itu jauh berbeda dengan apa yang dirasakan masyarakat Kota Langsa.

Secara faktual, kesejahteraan masyarakat belum terwujud secara maksimal. Pembangunan yang diharapkan dapat mendorong laju pertumbuhan ekonomi, ternyata hanya dinikmati sebahagian orang. Sementara sebahagian lagi tetap berada pada kondisi kemiskinan, sehingga kemiskinan tetap menjadi isu sentral yang terus hangat dibicarakan di Kota Langsa. Indikasi dari kemiskinan yang dialami masyarakat adalah terjadinya gizi buruk pada sejumlah anak-anak.

Dapat dipahami bahwa salah satu faktor penyebab terjadinya gizi buruk ini adalah kondisi miskin. Sebagaimana dijelaskan Safrina, gizi buruk secara umum dapat terjadi karena akibat kemiskinan, di samping pengetahuan kaum ibu yang rendah terhadap fungsi Air Susu Ibu (ASI). Kemiskinan membuat masyarakat merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi yang baik bagi anak-anak. Selama bulan Januari 2011, ditemukan tiga orang balita yang terserang gizi buruk dan tahun 2010 tercatat sebanyak empat orang yang terserang gizi buruk.⁹⁷

Indikasi belum maksimalnya pencapaian cita-cita masyarakat madani di Kota Langsa, dapat juga dilihat dari semakin tingginya tingkat kejahatan yang terjadi di Kota Langsa. Jika masyarakat Madinah adalah masyarakat yang nyaman, jauh dari kejahatan, maka masyarakat Langsa mengalami peningkatan kejahatan. Meskipun masyarakat Kota Langsa terkesan religius, tapi tingkat kejahatan di Kota Langsa semakin menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data kejahatan yang tercatat pada Kantor Kepolisian Resort Langsa, sebagaimana di bawah ini.

⁹⁷Data ini diperoleh dari penjelasan Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Langsa, Safrina, SKM, MKes pada surah kabar MedanBisnis tanggal 31 Januari 2011.

Tabel 4.1. Kriminalitas yang terjadi selama lima tahun terakhir (2006 sampai dengan bulan September 2010) di wilayah hukum Polres Kota Langsa

No	Tahun	Crime Total
1	2006	815
2	2007	791
3	2008	803
4	2009	303
5	2010	588
Jumlah		3100

Sumber: Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Langsa.

Fakta di atas menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kejahatan yang signifikan pada masyarakat Kota Langsa. Menurut analisis penulis, kejahatan yang terjadi di Kota Langsa tidak lepas dari semakin tumbuhnya penyakit sosial di masyarakat, seperti kemiskinan dan sebagainya yang menyebabkan seseorang bertindak instan atau serba cepat. Kondisi ini erat kaitannya dengan penjelasan Kartini Kartono bahwa diantara penyebab munculnya kejahatan pada masyarakat modern pada umumnya didorong beberapa hal, yaitu: Pertama, kebutuhan materiil yang tidak dapat terpenuhi dengan jalan wajar, bisa mendorong individu untuk melakukan kejahatan. Kedua, kondisi lingkungan dengan perubahan yang cepat menyebabkan seseorang tidak mampu bersaing. Ketiga, norma-norma dan sanksi sosial yang semakin longgar serta macam-macam subkultural dan kebudayaan asing yang saling berkonflik.⁹⁸

⁹⁸Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), h. 175.

Selain apa yang dijelaskan di atas, pemerataan prioritas pembangunan antara desa dan kota, juga masih menampakkan ketimpangan. Jika pada masyarakat Madinah Nabi dapat berlaku adil dalam melaksanakan pembangunan, maka berbeda dengan kondisi Kota Langsa. Pembangunan desa dan kota belum terlaksana secara proporsional. Secara faktual dapat diperhatikan, bahwa sampai pada tahun kesepuluh sejak Kota Langsa berdiri sebagai daerah otonom tahun 2011, pembangunan masih bersifat sentralisasi. Artinya, pembangunan lebih terkonsentrasi di wilayah perkotaan, sedangkan pembangunan desa cenderung terabaikan. Dengan demikian, penulis melihat apabila prioritas pembangunan masih dipusatkan di wilayah perkotaan, itu artinya bahwa masyarakat yang mampu menikmati hasil pembangunan jauh lebih sedikit ketimbang yang tergilas oleh pembangunan, sebab penduduk Kota Langsa banyak juga yang tinggal di desa-desa.

Oleh karena hal tersebut yang terjadi, maka sering muncul kecaman dari masyarakat terhadap kepemimpinan Kota Langsa. Sejumlah masyarakat mengatakan pada saat diwawancarai mengungkapkan kekecewaan terhadap kepemimpinan Kota Langsa, karena mereka beranggapan belum ikut merasakan pembangunan disebabkan oleh perencanaan pembangunan pemerintah Kota Langsa yang tidak adil. Sebagaimana dijelaskan Tengku Soleh, seorang tokoh masyarakat Gedubang Aceh bahwa pembangunan infra struktur jalan dan jembatan menuju ke kampungnya telah menyebabkan mobilitas masyarakat tidak lancar. Terbengkalainya pembangunan jembatan ke desanya menurut dia adalah akibat pemimpin yang korup.⁹⁹ Ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kepemimpinan, padahal kepemimpinan

⁹⁹Tengku Soleh, seorang tokoh masyarakat yang tinggal di Desa Geudubang Aceh. Hasil wawancara tanggal 23 Januari 2011 di Desa Geudubang Aceh.

pada masyarakat madani adalah kepemimpinan yang dapat mengayomi seluruh masyarakat.

Berdasarkan fakta di atas, penulis melihat bahwa pemerintah Kota Langsa harus segera merumuskan skala prioritas pembangunan yang sesuai dengan konteks masyarakat Langsa, agar dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat. Pemerintah tidak bisa mengabaikan begitu saja pembangunan desa-desa yang ada di Kota Langsa, karena masyarakat Kota Langsa banyak yang tinggal di pedesaan. Dengan demikian, pembangunan masyarakat madani di Kota Langsa harus lebih berorientasi pada peningkatan sumber daya masyarakat. Misalnya, mengarah pada perbaikan ekonomi rakyat yang lemah modal, bukan ekonomi konglomerasi semata.

Harapan tersebut masih jauh dari kenyataan yang terjadi. Secara praktis, pemerintah masih lebih berpihak pada pemilik modal. Sedangkan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi dan kesetaraan sebagaimana yang menjadi cita-cita masyarakat madani masih terabaikan. Sebagai contoh, kondisi masyarakat nelayan Kuala Langsa, terutama nelayan tradisional masih sangat memprihatinkan. Dari sisi ekonomi, sebahagian masyarakat Kuala Langsa dapat dikategorikan miskin. Mereka tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni dengan kondisi sanitasi yang sangat buruk. Secara realitas, kondisi ini dapat dikatakan belum terjamah oleh pembangunan yang direncanakan pemerintah Kota Langsa, padahal mereka merupakan bagian dari masyarakat Kota Langsa.

Menurut analisis penulis, salah satu yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan di Kota Langsa adalah karena pemerintah Kota Langsa masih berpola pada paradigma lama. Pembangunan masyarakat desa yang lemah

modal dianggap tidak berorientasi pada penumbuhan ekonomi (*economic growth*), melainkan sekedar menekan terjadinya kesenjangan ekonomi, sehingga pemerintah lebih berpihak pada pemodal. Dalam kaitan inilah, menurut pandangan penulis, pemerintah Kota Langsa perlu menawarkan dan mengemas program-program alternatif pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Pada satu sisi, uraian di atas menunjukkan kegagalan pemerintah Kota Langsa dalam mewujudkan masyarakat madani. Tetapi pada sisi lain pemerintah Kota Langsa berhasil mewujudkannya meskipun hasil tersebut belum maksimal. Misalnya dalam mewujudkan Kota Langsa sebagai kota yang damai, jauh dari perselisihan dan konflik. Jika masyarakat madani yang dibangun Nabi digambarkan sebagai masyarakat yang damai, maka Kota Langsa juga merupakan masyarakat yang damai. Padahal di dalamnya terdapat sejumlah etnis dan agama yang berbeda-beda. Maka sangat keliru pendapat orang yang mengatakan bahwa orang Aceh sangat benci kepada pemeluk agama lain.

Secara faktual, masyarakat Langsa bisa hidup berdampingan dengan masyarakat non-Islam, seperti Kristen dan Budha. Di Kota Langsa, orang Kristen bebas beribadah menurut kepercayaan mereka. Hal ini tidak lepas dari pendekatan komunikasi yang dilakukan pemerintah dengan pemeluk agama yang berbeda-beda. Di sinilah terlihat sekilas keberhasilan komunikasi pemerintah Kota Langsa dalam mengubah sikap fanatisme masyarakat, pendapat dan perilaku masyarakat Kota Langsa.

Dikatakan berhasil dalam mengubah sikap, karena selama ini Kota Langsa termasuk daerah konflik antara GAM dengan RI. Selama konflik terjadi, sikap

masyarakat serba salah. Jika mengikuti kemauan pemerintah, mereka merasa tertekan oleh kekuatan GAM. Sebaliknya, jika mereka mengikuti GAM mereka merasa tertekan oleh pemerintah dan aparat keamanan yang pro NKRI. Akibatnya sikap acuh tak acuh muncul dan saling curiga mencurigai semakin kuat di masyarakat.

Pasca penandatanganan MoU perdamaian antara RI dan GAM di Helsinki, masyarakat mulai merasa aman, dan aktivitas serta mobilitasnya semakin tinggi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Kota Langsa berusaha membangun komunikasi yang intensif kepada masyarakat, sehingga sikap acuh tak acuh, khawatir, ketakutan dan saling mencurigai tersebut hilang secara perlahan.

Masyarakat Kota Langsa secara perlahan mulai membuka diri kepada program pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Perubahan tersebut misalnya terlihat dari kesediaan untuk menjalani kehidupan yang Islami dan kesediaan untuk mewujudkan masyarakat Kota Langsa sebagaimana yang tertera dalam visi misinya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa pada satu sisi, komunikasi yang dilakukan pemerintah Kota Langsa dapat mewujudkan masyarakat madani, tetapi pada sisi lain komunikasi pemerintah belum mampu mewujudkan cita-cita tersebut secara maksimal. Ketidak maksimalan pencapaian cita-cita tersebut tidak lepas dari berbagai hambatan, baik yang muncul dari pemerintah dan yang muncul dari dalam masyarakat.

Faktor penghambat yang muncul dari pemerintah, dapat dikategorikan kepada poin-poin di bawah ini.

1. Sistem Komunikasi Yang Kurang Efektif

Pertama, kepemimpinan yang kurang efektif. Dalam masyarakat madani, kepemimpinan yang perlu ditunjukkan adalah kepemimpinan efektif, yaitu kepemimpinan yang mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang ada. Dalam hal ini, Thomas Gordon menjelaskan bahwa efektivitas seorang pemimpin mensyaratkan agar pemimpin tersebut memperlakukan orang lain dengan baik, dapat memberikan motivasi pada orang lain, sehingga orang lain komitmen dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan.¹⁰⁰

Sejarah mencatat, bahwa kepemimpinan Nabi di negara baru yang bernama Madinah, tidak lepas dari kepemimpinan efektif. Nabi menunjukkan bahwa hubungannya dengan umat Islam adalah hubungan antara pemeluk agama yang beriman dengan ketaatan serta loyalitas yang utuh pada seorang pemimpin pembawa kebenaran. Pada kasus-kasus yang terjadi semasa kepemimpinan Nabi, dapat ditegaskan bahwa kedudukan beliau sebagai pemegang kekuasaan tertinggi masyarakat Madinah dan fungsinya dalam melaksanakan mekanisme pengambilan keputusan begitu kuat dan berwibawa. Setiap keputusan yang ditetapkannya selalu ditaati, baik oleh umat Islam maupun umat Yahudi. Hal itu terjadi, bukan karena Nabi sebagai pemimpin, tetapi lebih dari itu Nabi mampu menghargai anggota masyarakat sesuai dengan derajat kemanusiannya.¹⁰¹

Keberhasilan Nabi dalam membangun masyarakat madani tersebut juga disebabkan oleh karena Nabi mampu memotivasi masyarakat untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Misalnya, jika sebelumnya suasana tidak nyaman, kemudian Nabi dapat mengatasi ketidaknyamanan tersebut dengan

¹⁰⁰Thomas Gordon, *Kepemimpinan yang Efektif* (Jakarta: Rajawali, 1986.), h. 8.

¹⁰¹*Ibid.*, h. 255.

menegakkan supremasi hukum. Ini menunjukkan, bahwa Nabi mampu memfungsikan kepemimpinannya sesuai dengan keinginan masyarakat. Selama memimpin, Nabi tidak pernah menyelewengkan hukum atau memarjinalkan satu kelompok dan memuliakan kelompok lain. Bahkan Nabi mengatakan dengan tegas, jika anaknya sekalipun yang mencuri, maka ia akan memotong tangannya. Ini artinya, Nabi memiliki komitmen terhadap penegakan hukum secara tidak pandang bulu.

Kondisi tersebut tentu sangat jauh berbeda dengan kepemimpinan Kota Langsa. Dari pengamatan yang dilakukan, penegakan supremasi hukum di Kota Langsa belum maksimal dilakukan dan masih jauh dari yang diharapkan. Hukum lebih berpihak kepada orang kaya, sedangkan orang miskin terabaikan.

2. Strategi dan Teknik Komunikasi

Strategi dan teknik komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak tepat sasaran dan kurang maksimal. Hal ini disebabkan karena pemerintah Kota Langsa belum memiliki surat kabar tersendiri. Idealnya, sebagai sebuah lembaga pemerintahan, pemerintah Kota Langsa harus memiliki surat kabar, atau paling tidak memiliki bulletin atau majalah yang bisa diterbitkan secara rutin dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, sehingga proses penyebaran informasi dapat terbantu dengan media tersebut.

Melalui media tersebutlah disosialisasikan kepada masyarakat secara rutin tentang pentingnya mewujudkan masyarakat madani. Melalui media-media tersebutlah pemerintah Kota Langsa bisa secara khusus menjelaskan kepada masyarakat, apa sebenarnya masyarakat madani. Dengan terpaan pesan-pesan

komunikasi yang disampaikan secara rutin, dimungkinkan masyarakat akan memahaminya dan menyadari pentingnya masyarakat madani tersebut.

3. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah Kota Langsa, merupakan salah satu faktor penghambat tidak maksimalnya hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pemerintah Kota Langsa sangat terbatas SDM nya, jika dibandingkan dengan luasnya jangkauan wilayah kerja yang akan ditelusuri. Akibatnya, pemerintah memiliki keterbatasan waktu untuk menyampaikan informasi secara rutin dan menyeluruh tentang pembangunan masyarakat madani ini kepada masyarakat. Keterbatasan waktu tersebut terjadi karena kegiatan rutin yang harus diselesaikan pemerintah juga sangat banyak, sehingga waktu yang tersedia untuk berkomunikasi dengan masyarakat relatif sangat sedikit.

Faktor-faktor di atas merupakan penghambat yang muncul dari pemerintah. Sedangkan faktor-faktor penghambat dari masyarakat adalah sebagaimana pada poin-poin di bawah ini.

1. Kurangnya Partisipasi Masyarakat

Kegagalan pembangunan masyarakat madani di Kota Langsa atau tidak tercapainya visi misi Kota Langsa, tidak semata-mata disebabkan oleh pihak pemerintah. Menurut pengamatan penulis, kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan dukungan kepada pemerintah juga menjadi faktor penghambat tercapainya target pembangunan tersebut. Keadaan ini dapat terjadi karena beberapa hal, pertama; pembangunan hanya menguntungkan segolongan kecil orang dan tidak

menguntungkan rakyat banyak, sehingga masyarakat menganggap pembangunan itu hanya untuk kepentingan sepihak. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Langsa idealnya sudah harus memulai sejak awal, untuk melibatkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalamnya. Baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kemudian seterusnya pemeliharaan.

Menurut penulis, ada beberapa faktor yang menyebabkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan ini. Pertama, kondisi sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial ekonomi masyarakat yang lebih dominan mengikuti pola agraris dan tradisional. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa pekerjaan utama masyarakat Kota Langsa adalah bertani dan berdagang dan mereka umumnya berdomisili di desa-desa. Meskipun tingkat pendapatan rata-rata penduduknya mencapai Rp 400.000,- sampai Rp 500.000,- perbulan, dan mereka pendapatan ini sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, tetapi sebagai masyarakat desa, ada tradisi pemikiran yang masih kuat bagi mereka. Tradisi pemikiran yang dimaksud adalah pasif dan pasrah menerima apa adanya.

Kedua, faktor politik yang meliputi kesadaran politik masyarakat dan pendidikan politik yang masih rendah. Ini terjadi karena komunikasi politik yang dilakukan pemerintah bukan untuk memberdayakan rakyat, tetapi untuk kepentingan pemerintah. Akibatnya, masyarakat tidak tau menahu tentang program pemerintah, dan minat serta perhatian masyarakat terhadap masalah pemerintah atau pembangunan menjadi rendah. Di samping itu, budaya titip aspirasi kepada tokoh agama, pimpinan desa maupun tokoh masyarakat, masih sangat kuat pada

masyarakat Kota Langsa. Akibatnya, perbaikan masyarakat menjadi tergantung pada jasa baik mereka. Ini menunjukkan lemahnya partisipasi masyarakat dalam menentukan kebijakan program pembangunan pemerintah .

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Kota Langsa harus membangun perekonomian masyarakat. Di samping itu, pemerintah harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Karena kondisi sosial ekonomi sebuah komunitas sangat berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Semakin tinggi pendapatan seseorang dan tingkat ekonominya semakin bagus, maka semakin tinggi mobilitasnya dalam masyarakat. Demikian juga dengan pemahaman politik masyarakat, bahwa kreativitas individu dalam berpartisipasi di masyarakat akan tumbuh dengan sendirinya, bila masyarakat sudah makmur. Setelah ekonomi masyarakat makmur, maka pembangunan itu dengan sendirinya akan mulai diminati masyarakat. Contoh paling sederhana, kenapa ada orang yang membangun rumah dengan fasilitas mewah, karena ekonominya baik dan memungkinkan untuk membangun rumah tersebut.

Jadi, demikian juga dengan masyarakat Kota Langsa. Jika ekonomi masyarakat semakin baik dan kondisinya semakin makmur, maka kesadaran masyarakat untuk membangun akan semakin tinggi. Masyarakat tidak lagi sekedar memikirkan kebutuhan ekonominya, tetapi akan berpikir tentang masa depan pembangunan bagi generasi yang akan datang. Konkritnya, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang cukup akan cenderung seimbang dalam memikirkan pemenuhan kebutuhan hidup dan partisipasinya dalam masyarakat.

Maka kaitannya dengan kondisi di atas, pemerintah terus membangun komunikasi intensif kepada masyarakat melalui berbagai saluran komunikasi. Pemerintah Kota Langsa juga terus berusaha membangun infrastruktur berupa pembangunan transportasi dan telekomunikasi. Dari pengamatan yang dilakukan, tidak ada lagi daerah di Kota Langsa yang masuk dalam *blank spot*. Seluruh Kota Langsa sudah terjangkau oleh jaringan *hand phone* maupun radio. Pemerintah terus membangun jaringan telekomunikasi dan perhubungan, baik darat maupun laut.

Pemerintah mulai membangun infrastruktur jalan. Jalan-jalan utama yang mendukung majunya pusat-pusat ekonomi rakyat mulai diperbaiki. Demikian juga dengan perhubungan laut, yang terkonsentrasi di pelabuhan Kuala Langsa mulai dibenahi. Seperti diketahui bahwa pelabuhan Kuala Langsa memiliki kapasitas ekspor impor. Pelabuhan yang terletak di Kecamatan Langsa Kota menyimpan peluang besar memacu pergerakan perekonomian Kota Langsa.

Tersedianya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan terintegrasi, disamping dapat meningkatkan kelancaran mobilitas orang dan barang, tentu akan mampu membuka dan mengembangkan seluruh wilayah serta potensi sumber daya alam lainnya yang ada di Kota Langsa. Demikian juga dengan terkelolanya sumber daya alam dan lahan secara efisien dan efektif dapat berguna bagi peningkatan produktifitas hasil pertanian masyarakat. Dalam kaitan inilah pemerintah Kota Langsa terus mengintensifkan komunikasi kepada masyarakat.

2. Agama Belum Menjadi Spirit Pembangunan

Agama diyakini dapat memberikan motivasi bagi seseorang untuk melakukan berbagai kegiatan. Hal ini terlihat dari kuatnya dorongan seseorang atau kelompok

untuk mengejar tingkat kehidupan yang lebih baik. Keyakinan akan adanya balasan dari Tuhan berupa pahala, merupakan motivasi bagi penganut agama untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu kehidupan tanpa mengharapkan imbalan yang berlebihan.

Tetapi dari realitas yang muncul pada masyarakat Kota Langsa, ajaran agama belum benar-benar menjadi motivasi bagi sebahagian masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Meskipun di awal dikatakan bahwa masyarakat Kota Langsa sebagai masyarakat religius, tetapi religiusitas tersebut belum menjadi roh bagi pelaksanaan pembangunan. Religiusitas tersebut masih cenderung kepada simbol-simbol daripada sebuah pengamalan yang mengakar dalam diri masyarakat muslim. Berbagai kasus korupsi dan penyelewengan dana pembangunan yang dilakukan para pejabat daerah merupakan indikasi tidak mengakarnya nilai-nilai agama bagi spirit pembangunan. Para pemimpin masih berpikir untuk memperkaya diri sendiri, meskipun itu dilarang agama dan mengabaikan kemaslahatan orang banyak.

Demikian juga dengan masih kuatnya kemalasan dan kebodohan yang menimpa sebahagian masyarakat. Ini mengindikasikan betapa tidak mengakarnya ajaran agama menjadi spirit bagi pembangunan. Padahal, secara tegas Allah katakan dalam Alquran, bahwa tidak akan merubah nikmat yang ada pada suatu kaum, kecuali mereka sendiri yang melakukan perubahan itu.¹⁰² Hal ini juga menunjukkan bahwa sebahagian masyarakat hanya memahami agama sebatas kegiatan ritual keakhiratan, sehingga yang cenderung muncul adalah kesalehan pribadi yang kurang

¹⁰²QS. Ar Ra'du/ 13: 11.

didukung oleh kesalehan sosial. Sikap ini tentu berbanding terbalik dengan ajaran Islam yang bukan hanya sekedar kaya dengan ritual, namun juga menjunjung tinggi etos, seperti yang terdapat dalam beberapa ayat di bawah ini.

1. Etos kebangsaan. Sebagaimana firman Allah dalam Alquran, “Manusia itu adalah bangsa yang satu (setelah timbul perselisihan), maka Allah mengutus para nabi, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan”.¹⁰³
2. Etos persatuan, sebagaimana firman Allah dalam Alquran, ”Dan Berpeganglah kamu semua pada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai”.¹⁰⁴
3. Etos intelektual, sebagaimana Allah dalam Alquran, ”Katakanlah adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?”.¹⁰⁵
4. Etos sosial, sebagaimana firman Allah dalam Alquran, ”Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”.¹⁰⁶
5. Etos kerja, sebagaimana firman Allah dalam Alquran, ”Dan katakanlah: bekerjalah, maka Allah dan Rasul-Nya akan melihat pekerjaanmu itu”.¹⁰⁷
6. Etos apresiasi terhadap suatu karya, sebagaimana disebutkan dalam firman, ”Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat biji dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya”.¹⁰⁸

Uraian di atas menunjukkan bahwa Islam memadukan antara keseimbangan dunia dan akhirat. Islam tidak hanya sekedar berbicara teologi, tetapi berbicara juga tentang hubungan sosial. Sebagaimana yang dikutip M. Natsir dari H.A.R. Gibb yang menegaskan bahwa Islam sesungguhnya bukan hanya satu sistem teologi semata, tetapi ia merupakan peradaban yang lengkap. Statemen ini disepakati oleh semua kelompok umat Islam dan mendukung sebuah perpaduan (integritas) antara agama

¹⁰³QS. Al Baqarah/ 2: 213.

¹⁰⁴QS. Ali Imr±n/ 3: 103.

¹⁰⁵QS. A©^aumar/ 39: 9.

¹⁰⁶QS. Al M±idah/ 5: 2.

¹⁰⁷QS. At Taubah/ 9: 105.

¹⁰⁸QS. A©^aalzalal/ 99: 7.

dan urusan dunia merupakan satu entitas yang utuh. Sehingga antara yang profan dan sakral tidak ada perbedaan yang mencolok.¹⁰⁹

Dalam kaitannya dengan argumentasi di atas, maka idealnya ajaran agama (Islam) sebagai nilai-nilai yang berasal dari Tuhan, harus menjadi kerangka etis dalam pembangunan masyarakat madani. Agama tidak hanya sekedar simbol melainkan benar-benar mengakar dalam diri masyarakat, dan dapat diterjemahkan ke dalam pembentukan masyarakat madani atau masyarakat yang ber peradaban. Dengan demikian, maka kepemimpinan yang bersih, jujur dan baik akan terwujud, dan masyarakatnya akan lebih santun dan menjadikan agama sebagai tolok ukur kehidupan sehari-hari. Seiring dengan itu, isu kemiskinan, ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, pelecehan atas hak asasi manusia (HAM) akan segera dapat diselesaikan.

Menurut analisis penulis, belum terwujudnya masyarakat madani yang dicita-citakan pemerintah Kota Langsa, tidak hanya disebabkan oleh sistem komunikasi yang dilakukan pemerintah kepada masyarakat. Tapi lebih jauh dari itu, bahwa pada masyarakat yang sedang berkembang, hal itu masih sulit dilakukan. Seperti halnya pada konteks masyarakat Kota Langsa, dapat dikatakan bahwa kotanya masih baru dibentuk dan masyarakatnya tengah berada pada titik memulai kembali setelah mengalami konflik berkepanjangan. Jadi semua aspek masih perlu dibenahi sampai pada tingkat keamanan.

Dalam kaitan itu, penulis melihat bahwa membangun masyarakat Kota Langsa yang madani, memerlukan kerangka dan pendekatan yang lebih bersifat

¹⁰⁹M. Natsir, *Capita Selecta* (Jakarta: Bulan bintang, 1994), h. 3.

evolusioner dari pada revolusioner. Pada saat yang sama, kerangka dan pendekatan yang bersifat evolusioner secara implisit lebih menawarkan ongkos sosial yang lebih kecil dari pada pendekatan revolusioner. Tidak hanya itu, pendekatan evolusioner akan lebih mampu menjaga eksistensi perdamaian, ketertiban dan keteraturan masyarakat. Atas dasar itulah penulis melihat bahwa arah dan prospek menuju Kota Langsa sebagai masyarakat madani masih membutuhkan waktu yang cukup panjang.

Penulis juga melihat, bahwa untuk membangun masyarakat madani di Kota Langsa, paling tidak harus ada tiga syarat yang harus dimiliki masyarakat. Pertama, menciptakan inovasi dan kreasi dengan menguasai pendidikan, informasi dan peningkatan sumber daya manusia. Kedua, mencegah kerusakan-kerusakan sumber daya yang ada di tengah-tengah masyarakat. Ketiga, pemantapan spiritualitas dengan menjadikan Islam sebagai pandangan hidup dan spirit bagi pembangunan.

Jika syarat-syarat di atas terpenuhi seluruhnya, maka masyarakat madani akan terwujud. Pada akhirnya masyarakat madani akan memiliki peran signifikan dalam memelopori dan mendorong pembangunan. Untuk menuju kepada masyarakat madani tersebut, bisa di rintis melalui penyelenggaraan program pendidikan, peningkatan perekonomian rakyat, pendidikan politik kepada masyarakat. Hal-hal di atas menurut penulis sangat kongkrit dan mendesak untuk digarap oleh pemerintah, guna memelopori dan mendorong terwujudnya masyarakat madani yang dicita-citakan.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini ialah:

1. Bahwa dalam mewujudkan masyarakat madani di Kota Langsa, pemerintah telah melakukan berbagai macam bentuk komunikasi dengan teknik yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Langsa. Pemerintah berkomunikasi kepada masyarakat dengan cara tatap muka, berdialog langsung dengan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Pemerintah juga melakukan komunikasi intensif dengan menggunakan media massa, seperti kehumasan, periklanan dan media tradisional berupa kesenian rakyat.
2. Informasi pembangunan disampaikan pemerintah kepada masyarakat, dengan tujuannya agar masyarakat berperan aktif dalam pembangunan menuju masyarakat madani. Namun demikian, teknik komunikasi yang dilakukan, ternyata tidak menjamin bagi tercapainya cita-cita pembentukan masyarakat madani di Kota Langsa.
3. Belum terwujudnya masyarakat madani yang dicita-citakan secara maksimal, tidak hanya disebabkan oleh komunikasi pemerintah yang kurang intensif kepada masyarakat. Tetapi tingkat ekonomi masyarakat, pendidikan, kesadaran politik, partisipasi masyarakat, turut juga menjadi bagian yang

menghambat pencapaian cita-cita tersebut. Hal ini disadari, karena masyarakatnya Kota Langsa adalah masyarakat yang sedang berada pada titik memulai kembali setelah mengalami konflik berkepanjangan, sehingga perlu dilakukan pembenahan dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dibahas, maka selanjutnya dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada pemerintah Kota Langsa agar tetap menjaga kontinuitas proses komunikasi yang telah dilakukan selama ini, baik melalui komunikasi tatap muka, maupun melalui komunikasi bermedia.
2. Disarankan kepada pemerintah Kota Langsa, agar tetap menggunakan media-media tradisional sebagai media komunikasi informasi dalam menyampaikan program-program pembangunan, karena media tradisional adalah budaya yang senantiasa terpelihara nilai-nilainya dalam masyarakat.
3. Disarankan kepada pemerintah Kota Langsa, agar terlebih dahulu melakukan penguatan pada ekonomi masyarakat, pemberian pendidikan politik kepada masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat dapat lebih meningkat.
4. Disarankan kepada masyarakat Kota Langsa agar ikut pro aktif dan berperan serta dalam mewujudkan cita-cita masyarakat madani, sesuai dengan visi dan misi Kota Langsa dengan menjadikan agama sebagai ruh dari pembangunan yang dilakukan.

4. DAFTAR KEPUSTAKAAN

5.

- 6.
7. Anwar, Chairil. *Islam dan Tantangan Kemanusiaan Abad XXI*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- 8.
9. Anwar, M. Syafii. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.
- 10.
11. Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 12.
13. Bungin, Burhan. *Sosiologi Komunikasi: Teori, Paradigma, Dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- 14.
15. Cangara, Hafied. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1998.
- 16.
17. Cholisin. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- 18.
19. Depari, Eduard. *Peran Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- 20.
21. Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Alquran, 1985).
- 22.
23. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- 24.
25. Effendy, Onong Uchjana. *Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung: Penerbit Aditya Bakti, 1993.
- 26.
27. _____. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, cet. 18. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- 28.
29. _____. *Dinamika Komunikasi*, cet. 5. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- 30.
31. Gaffar, Affan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- 32.
33. Guritno, Pandam. “Wayang Purwa Sebagai Medium Komunikasi” dalam Eduard Depari dan Colin MacAndrews, *Peranan Komunikasi Massa dalam Pembangunan*. Yogyakarta: UGM Press, 1995.
- 34.
35. Gordon, Thomas. *Kepemimpinan yang Efektif*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- 36.

37. Hamdah, Hanung Hizbullah. *Komunikasi Dakwah Melalui Pendekatan Komunikasi Pemasaran*. www.marketing communication, com. Juni 2007.
- 38.
39. Hamim, Thoha. "Islam dan Masyarakat Madani, HAM, Pluralisme dan Toleransi Beragama," dalam *Koran Harian Jawa Pos* (11 Maret 1999).
- 40.
41. Hasan, Andri. *Teknik Komunikasi*. www.pjtv.co.id, 2008.
- 42.
43. Hidayat, Komaruddin. *Tragedi Raja Midas Moralitas Agama dan Krisis Modernitas*. Paramadina: Jakarta, 1998.
- 44.
45. Jainuri, Achmad. "Agama dan Masyarakat Madani: Rujukan Khusus tentang Sikap Budaya, Agama, dan Politik (Sebuah Pengantar)," dalam Sufiyanto, *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LP2IF, 2001.
- 46.
47. Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- 48.
49. Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*, cet 8. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- 50.
51. Kriyantono, Rachmat. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertasi Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*. Jakarta: Kencana, 2006.
- 52.
53. Liliweri, Alo. *Gatra-Gatra Komunikasi Antarbudaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- 54.
55. Madjid, Nurcholis. *Islam Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina, 1992.
- 56.
57. _____. *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina, 1999.
- 58.
59. Mufid. *Reformasi Hukum Menuju Masyarakat Madani* (www.umm.ac.id, 1999).
- 60.
61. Mulyana, Deddy. *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar*, cet. 2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- 62.
63. _____. *Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- 64.
65. Moleong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- 66.

67. Najib, Mohammad Dkk, ed. *Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara*. Yogyakarta: LKPSM, 1996.
- 68.
69. Narwoko, J. Dwi dan Bagong Suyanto. *Sosiologi: Teks Pengantar dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2004.
- 70.
71. Nasution, Harun. *Islm Rasional: Gagasan dan Pemikiran*, cet 5. Bandung: Mizan, 1998
- 72.
73. _____. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, jilid I. Jakarta: UI Press, 1986.
- 74.
75. Nasution, Zulkarimein. *Komunikasi Pembangunan Pengenalan Teori dan Penerapannya*, cet 3. Jakarta: RajaGarafindo Persada, 1998.
- 76.
77. Natsir, M. *Capita Selecta*. Jakarta: Bulan bintang, 1994.
- 78.
79. Nawawi, Hadari. *Kepemimpinan yang Efektif*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- 80.
81. Nurtjahjo, Hendra. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta; PT. Bumi Aksara, 2006.
- 82.
83. Poerbopranoto, Koentjoro. *Sistem Pemerintahan Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1988.
- 84.
85. Pulungan, J. Suyuthi. *Prinsip-Prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Alquran*. Jakarta: Rajawali Press dan LSIK, 1994.
- 86.
87. Qodir, Zuly. *Pembaharuan Pemikiran Islam: Wacana Aksi Islam Indonesia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- 88.
89. Rahardjo, Dawam. *Masyarakat Madani: Agama Kelas Menengah dan Perubahan Sosial*. JakartaL LSAF dan LP3ES, 1999.
- 90.
91. Rais, Amin. *Tauhid Sosial: Formula Menggempur Kesenjangan*. Bandung: Mizan, 1998.
- 92.
93. Rakhmat, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi* Bandung: Remaja Rosdakarya, 1984.
- 94.
95. Rogers, Everett M. dan F. Floyd Shoemaker, *Communication of Innovations*, terj. Abdillah Hanafi. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- 96.
97. _____, *Diffusion of Inovation*. London: Colier MacMillan Publishers, 1983.
- 98.

99. Ruslan, Rosyadi. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004.
- 100.
101. Saefuddin, A.M. *et.al, Desekularisasi Pemikiran: Landasan Islamisasi*, cet. 2. Bandung: Mizan, 1990.
- 102.
103. Sampurna, Ahmad. *Sistem Komunikasi Badan Koordinasi Agama Islam (BKIA) dalam Meningkatkan Pengamalan Agama Karyawan pada Perusahaan PTPN III Kebun Merbau Selatan Labuhan Batu*. Tesis Pascasarjana IAIN SU Medan, 2007.
- 104.
105. Sarbaguna, Boy S. *Analisis Data Pada Penelitian Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 2004.
- 106.
107. Sendjadja. S. Djuarsa. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Universitas Terbuka Departemen pendidikan dan Kebudayaan RI, 1994.
- 108.
109. Siagian, Sondang P. *Teori dan Praktek Kepemimpinan* Jakarta: PT. Bina Aksara, 1988.
- 110.
111. Siregar, Mawardi. *Sistem Komunikasi Pemerintah Dalam Pembangunan Keagamaan di Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005-2006*. Tesis: Program Pascasarjana IAIN SU Medan, 2007.
- 112.
113. Sitompul, Mukti. *Konsep-Konsep dalam Komunikasi Pembangunan* (www.digilib USU. ac.id, 2006.
- 114.
115. Soetrisno, Loekman. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- 116.
117. Sufyanto. *Masyarakat Tamaddun: Kritik Hermeneutis Masyarakat Madani Nurcholis Madjid*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- 118.
119. Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2000.
- 120.
121. Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.
- 122.
123. Susanto, Astrid S. *Komunikasi Sosial di Indonesian*. Bandung: Bina Cipta, 1985.
- 124.
125. Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*, terj. Arif Maftuhin Dzohir. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- 126.

127. Tohadi, Mohammad. *Oase Kebangsaan: Serpihan Pemikiran Soal Rakyat, Negara dan Bangsa*. Jakarta: Lembaga Kajian Wacana Indonesia, 2000.
- 128.
129. Wiryanto. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: PT. Grasindo, 2001